



**UPAYA SOUTHEAST ASIAN MINISTER OF EDUCATION (SEAMEO)
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI ASIA
TENGARA PADA ERA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**

***(THE EFFORTS OF SOUTHEAST ASIAN MINISTER OF EDUCATION
(SEAMEO) IMPROVING QUALITY OF EDUCATION IN ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY'S ERA)***

SKRIPSI

Oleh

Ryan Erick Wardiqa

100910101072

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**UPAYA SOUTHEAST ASIAN MINISTER OF EDUCATION (SEAMEO)
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI ASIA
TENGGERA PADA ERA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**

***(THE EFFORTS OF SOUTHEAST ASIAN MINISTER OF EDUCATION
(SEAMEO) IMPROVING QUALITY OF EDUCATION IN ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY'S ERA)***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Ryan Erick Wardiqa

100910101072

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Sri Utami dan Ayahanda Anwar Sodik yang telah mendoakan, membimbing, serta memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang tiada terhingga hingga sampai saat ini;
2. Kakak Reny Yusnita Sari dan Adik Muchammad Tetto Wibisono yang selalu mendukung;
3. Bapak dan Ibu Guru sejak TK sampai dengan SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Program Studi Hubungan Internasional;
5. Mas Eko, Mas Galuh, Mas Aji, Satya, dan seluruh team beserta manajemen OK Production yang selalu memberi dukungan dan juga menjadi sumber pendapatan sampingan disaat gundah gulana;
6. Taman-teman Mahasiswa Hubungan Internasional 2010 dan teman-teman yang membantu pengerjaan skripsi ini: Rendy Wahyu, Nur Rahmad, Susetya Tegar

MOTO

“Pintar tidak harus Besar”- Steve Jobs¹

Mau Gagal, Mau Sukses itu Tidak Penting. Yang penting Berhasil ”- Lies
Hartono²



¹Quote of the Day. 2005. Diakses dari <http://www.twitter.com> pada 26 Mei 2017

²Quote of the Day. 2015. Diakses dari <http://www.twitter.com> pada 26 Mei 2017

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryan Erick Wardiqa

Nim : 100910101072

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa karya ilmiah yang berjudul “Upaya *Southeast Asian Minister of Education (SEAMEO)* dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Asia Tenggara pada Era *ASEAN Economic Community*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juli 2017

Yang Menyatakan

Ryan Erick Wardiqa

NIM 100910101072

SKRIPSI

**UPAYA SOUTHEAST ASIAN MINISTER OF EDUCATION (SEAMEO)
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI ASIA
TENGGERA PADA ERA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**

Oleh

Ryan Erick Wardiqa

100910101072

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama

:Drs. Djoko Susilo, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota

:Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos. M.Si.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Upaya *Southeast Asian Minister of Education (SEAMEO)* dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Asia Tenggara pada Era *ASEAN Economic Community*” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Rabu
tanggal : 5 Juli 2017
waktu : 12.00 WIB
tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Drs. Abu Bakar Eby Hara, MA, Ph.D
NIP 196402081989021001

Sekretaris I

Drs. Pra Adi Sulistiyono, M. Si
NIP196105151988021001

Sekretaris II

Adhiningsih Prabhawati, S.Sos., M. Si
NIP197812242008122001

Anggota I

Drs. Djoko Susilo, M. Si
NIP195908311989021001

Anggota II

Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos, M. Si
NIP19721204199931004

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Upaya *Southeast Asian Minister of Education (SEAMEO)* dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Asia Tenggara pada Era *ASEAN Economic Community*; Ryan Erick Wardiqa; 2010; 99 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pada 31 Desember 2015, masyarakat di kawasan Asia Tenggara secara resmi dihadapkan pada suatu era baru yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Upaya ASEAN untuk mengintegrasikan kawasan melalui kerjasama ekonomi sebenarnya ASEAN bertujuan untuk mempersiapkan negara anggotanya dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara maju. Dengan diberlakukannya MEA sebagai agenda perekonomian utama secara langsung menuntut negara di kawasan Asia Tenggara untuk menyediakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan layak bersaing. Keadaan ini membuat peran sebuah organisasi dalam bidang pendidikan perlu untuk mewujudkan peran dan fungsinya secara nyata. Asia Tenggara sebenarnya telah memiliki sebuah organisasi yang khusus menangani masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dan dikenal dengan SEAMEO. SEAMEO resmi dibentuk pada tahun 1965. Adanya organisasi yang berkaitan dengan kerja sama dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya atau dikenal dengan SEAMEO tentunya dapat menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas sehingga mampu bersaing dalam era perdagangan bebas. Namun, tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda di kawasan Asia Tenggara membuat sistem pendidikan yang berbeda pula antar negara di kawasan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rangkaian upaya yang dilakukan oleh *Southeast Asian Minister of Education Organization (SEAMEO)* dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Asia Tenggara pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk meneliti Upaya *Southeast Asian Minister of Education* (SEAMEO) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Asia Tenggara pada Era *ASEAN Economic Community*. Metode penelitian tersebut meliputi dua hal, yaitu teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka (*library research*) untuk memperoleh data sekunder. Berdasarkan data-data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh SEAMEO untuk meningkatkan mutu pendidikan di Asia Tenggara agar mampu menghasilkan manusia yang lebih berkualitas ialah dengan menerapkan *seven priority agenda* yaitu perawatan pendidikan anak usia dini, mengatasi Hambatan dalam Pendidikan atau *Addressing Barriers to Inclusion*, Memastikan Ketahanan dalam Keadaan Darurat atau *Ensuring Resiliency in the Face of Emergencies*, Mempromosikan Teknis dan Pelatihan Pendidikan atau *Promoting Technical and Vocational Education and Training*, Revitalisasi Tenaga Pengajar (Guru) atau *Revitalising Teacher Education*, Mempromosikan Penyelarasan dalam Pendidikan Tinggi dan Bidang Penelitian atau *Promoting Harmonisation in Higher Education and Research*, serta Mengadopsi Kurikulum Abad ke-21 atau *Adopting a 21st Century Curriculum*.

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah, dan karuniaNya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA SOUTHEAST ASIAN MINISTER OF EDUCATION (SEAMEO) DALAM USAHA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI WILAYAH ASIA TENGGARA PADA ERA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY** “Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, baik karena keterbatasan ilmu yang dimiliki maupun kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis menerima segala saran dan kritik yang berguna untuk perbaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Djoko Susilo, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah dengan sepenuh hati, sabar, dan pengertian memberikan banyak semangat dan nasehat yang membangun bagi penulis. Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos, M. Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah dengan dengan sepenuh hati, sabar, dan pengertian memberikan banyak semangat dan nasehat yang membangun dan bermanfaat bagi penulis.
2. Kedua Orang Tuaku, yang telah memberikan banyak sekali kasih sayang, cinta, doa, dan semangat selama perjalanan penyelesaian tugas akhir.
3. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu dan seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang banyak memberikan semangat tersendiri dalam penyelesaian tugas akhir.

4. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2010 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, semoga kesuksesan menyertai kalian.

Semoga Allah selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah tulus ikhlas membantu. Penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi yang membacanya, Amin.

Jember, 2017

Penulis



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ii |
| MOTO | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iv |
| HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI | v |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vi |
| RINGKASAN | vii |
| PRAKATA | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| BAB 1. | |
| PENDAHULUAN..... | |
| 1 | |
| 1.1 Latar Belakang | |
| 1 | |

1.2 Ruang Lingkup

Pembahasan.....

8

1.2.1 Batasan

Materi

8

1.2.2 Batasan

Waktu

8

1.3 Rumusan

Masalah.....

9

1.4 Tujuan

Penelitian.....

10

1.5 Landasan

Pemikiran

10

1.5.1 Konsep

Regionalisme

12

1.5.2 Teori Organisasi

Internasional

15

1.6 Argumen

Utama.....

17

1.7 Metode

Penelitian.....

17

| | |
|---|-----------|
| 1.7.1 Metode Pengumpulan | |
| Data | 18 |
| 1.7.2 Metode Analisis | |
| Data | 18 |
| 1.8 Sistematika | |
| Penulisan | 19 |
| BAB 2. PEMBENTUKAN <i>SOUTHEAST ASIA MINISTER OF EDUCATION ORGANIZATION</i> (SEAMEO) DAN BERLAKUNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) TAHUN 2015..... | 23 |
| 2.1 <i>Southeast Asian Minister of Education Organization</i> (SEAMEO) | 26 |
| 2.2 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) | 37 |
| BAB. 3 PENDIDIKAN DI ASIA TENGGARA..... | 39 |
| 3.1 Pendidikan di Indonesia | 43 |
| 3.2 Pendidikan di Malaysia..... | 52 |
| 3.3 Pendidikan di Singapura | 58 |

| | |
|--------------------------|--|
| 3.4 Pendidikan di | |
| Thailand | |
| 60 | |
| 3.5 Pendidikan di | |
| Filiphina | |
| 64 | |
| 3.6 Pendidikan di Brunei | |
| Darrussalam | |
| 66 | |
| 3.7 Pendidikan di | |
| Myanmar | |
| 68 | |
| 3.8 Pendidikan di | |
| Kamboja | |
| 70 | |
| 3.9 Pendidikan di | |
| Laos | |
| 72 | |
| 3.10 Pendidikan di | |
| Vietnam | |
| 74 | |
| 3.11 Pendidikan di Timor | |
| Leste | |
| 76 | |

BAB 4. SEVEN PRIORITY AREA

| | |
|-------------------------------------|--|
| SEAMEO | |
| 79 | |
| 4.1 <i>Early Childhood Care and</i> | |
| <i>Education</i> | |
| 79 | |

| | |
|---|------------|
| 4.2 <i>Addressing Barriers to Inclusion</i> | 82 |
| 4.3 <i>Ensuring Resiliency in the Face of Emergencies</i> | 84 |
| 4.4 <i>Promoting Technical and Vocational Education and Training</i> | 86 |
| 4.5 <i>Revitalising Teacher Education</i> | 87 |
| 4.6 <i>Promoting Harmonisation in Higher Education and Research</i> | 88 |
| 4.7 <i>Adopting a 21st Century Curriculum</i> | 89 |
| 4.8 <i>Tantangan dan Hambatan yang di Hadapi Oleh Southeast Asian Minister of Education Organization (SEAMEO) pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)</i> | 90 |
| BAB 5. | |
| KESIMPULAN | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA | 94 |
| LAMPIRAN | 105 |



DAFTAR TABEL

Halaman

| | |
|--|----|
| 3.1Jumlah Lembaga Pendidikan Menurut Jenis Sekolah di Indonesia Tahun 2015 | 51 |
| 3.2Jumlah Partisipasi Anak Pada Pendidikan Dasar di Malaysia pada Tahun 2016..... | 56 |

| | |
|---|----|
| 3.3 Jumlah Partisipasi Anak pada Sekolah Menengah (Secondary School) di Malaysia pada tahun 2016..... | 57 |
| 3.4 Jumlah Sekolah di Thailand Tahun 2016..... | 62 |
| 3.5 Jumlah Guru dan Tenaga Pengajar Lainnya di Singapura pada Tahun 2016..... | 63 |
| 3.6 Tren IPM di Brunei Darrussalam Periode tahun 1990-2015 Berdasarkan Faktor Penunjangnya..... | 67 |

DAFTAR GAMBAR

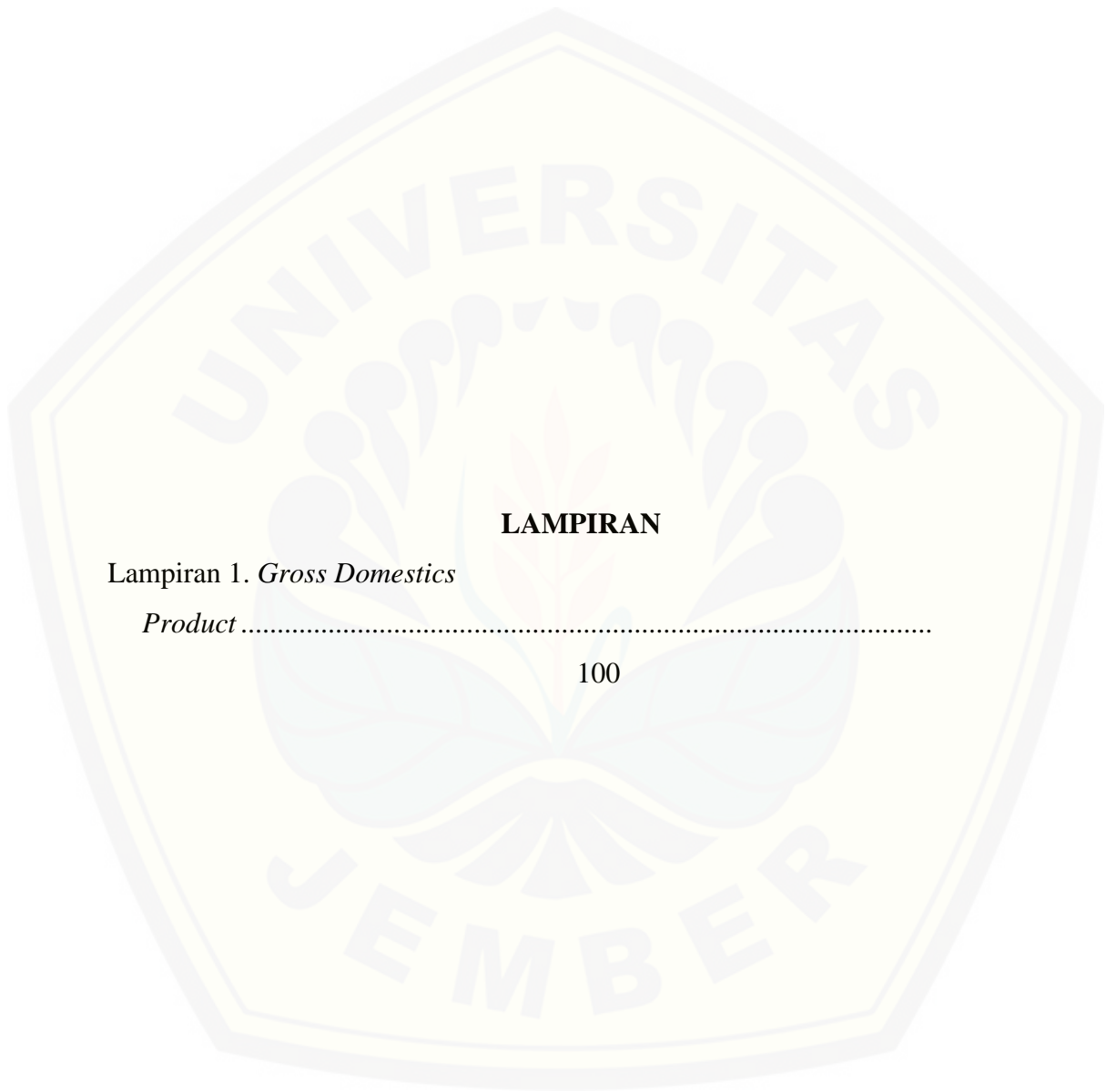
Halaman

| | |
|--|----|
| 2.1 SEAMEO center di Masing-masing negara di Kawasan Asia Tenggara..... | 31 |
| 3.1 Jumlah Anggaran Dana Pendidikan Indonesia yang Beasal dari Dalam Negeri Tahun 2015..... | 47 |
| 3.2 Jumlah Pendaftaran Siswa di Indonesia Tahun 20..... | 49 |
| 3.3 Jumlah Partisipasi Anak di Singapura dalam Pendidikan pada Periode Tahun 2005 dan 2015 | 60 |
| 4.1 Pertemuan SEAMEO REFCON ke-11 | 83 |
| 4.2 Lulusan Program Beasiswa DAAD | 85 |
| 2.3 Workshop Pelatihan Keterampilan Guru..... | 90 |
| 4.4 Pertemuan ke-2 SEAMEO <i>Collage</i> | 95 |



DAFTAR SINGKATAN

| | |
|--------|--|
| AEC | : <i>ASEAN Economic Community</i> |
| ASEAN | : <i>Assosiationof Southeast Asian Nations</i> |
| EFA | : <i>Education For All</i> |
| GDP | : <i>Gross Domestic Product</i> |
| IPM | : <i>Indeks Pembangunan Manusia</i> |
| MEA | : <i>Masyarakat Ekonomi ASEAN</i> |
| MNC | : <i>Multinational Corporations</i> |
| OECD | : <i>Organisation for Economic Cooperation and Development</i> |
| SEAMEO | : <i>Southeast Asian Minister of Education Organization</i> |
| UNESCO | : <i>United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization</i> |
| WEF | : <i>World Economic Forum</i> |



LAMPIRAN

Lampiran 1. *Gross Domestic*

Product.....

100

B 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu faktor kebutuhan dasar yang harus dimiliki setiap individu karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini karena pendidikan yang memadai mampu menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas sehingga cepat tanggap dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan negara.³

Fenomena pendidikan tentu berbeda-beda di setiap negara. Pendidikan menjadi salah satu indikator yang sangat penting kaitannya dengan pembangunan negara di negara maju. Tidak sedikit pula dana yang dikeluarkan oleh pemerintah negara maju untuk mendukung program-program menteri pendidikan yang ada di negaranya. Menurut laporan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) total jumlah anak-anak yang bersekolah di negara-negara yang tergolong dalam kategori negara berpendapatan tinggi (*high income countries*) pada tahun 2012 ialah sebanyak 36.907 juta anak.⁴ Sebaliknya di negara berkembang fenomena pendidikan tidaklah sebaik yang ada di negara maju. Hampir semua negara berkembang dihadapkan pada permasalahan-permasalahan pendidikan di negaranya dan hal ini pada akhirnya menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan. Faktor utama yang menjadi penyebabnya ialah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang masih terjadi di negara berkembang. Pendidikan dan perekonomian seakan menjadi dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Pendidikan yang rendah dapat menyebabkan kemiskinan dan keterpurukan

³Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). 2016. "Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara Siapkan Program Aksi Pendidikan". Diakses dari <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/04/organisasi-menteri-pendidikan-asia-tenggara-siapkan-program-aksi-pendidikan> pada 19 Januari 2017

⁴Theguardian. 2010. "World education rankings: which country does best at reading, maths and science?". Diakses dari <https://www.theguardian.com/news/datablog/2010/dec/07/world-education-rankings-maths-science-reading#data> pada 19 Januari 2017

ekonomi, begitu pula dengan kemiskinan yang pada akhirnya juga dapat menyebabkan kebodohan dan rendahnya kualitas pendidikan.⁵ UNESCO melaporkan bahwa total jumlah anak yang bersekolah di negara yang tergolong negara berpendapatan rendah (*low income countries*) pada tahun 2012 ialah sebanyak 12.381 juta anak.⁶

Berdasarkan data *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 2009, China merupakan negara yang menempati urutan pertama sebagai negara dengan pendidikan terbaik di dunia, kemudian pada urutan kedua ialah Korea Selatan, ketiga ialah Finlandia, dan selanjutnya ialah Singapura.⁷ pada tahun 2014 UNESCO mengkategorikan jumlah anak yang bersekolah berdasarkan wilayah regional, Asia Selatan dan Asia Barat menempati urutan pertama, yaitu dengan jumlah 53.5 juta anak, Asia Timur dan Pasifik sebanyak 53.3 juta anak, Amerika Utara dan Eropa Barat sebanyak 23 juta anak, Amerika Latin dan Kepulauan Karibia sebanyak 21 juta anak, Sub-Sahara Afrika sebanyak 14 juta anak, Eropa Tengah dan Eropa Timur sebanyak 12 juta anak, *Arab States* sebanyak 4 juta anak, dan Asia Tengah sebanyak 1 juta anak.⁸

Upaya negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya tentu tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak asing, baik itu negara lain ataupun organisasi internasional. Sama halnya dengan usaha negara untuk memenuhi kebutuhan pendidikan rakyatnya. Ketidakmampuan negara untuk memenuhi semua kebutuhan dalam negerinya sendiri menyebabkan negara tersebut harus bekerja sama dengan pihak lain. Usaha yang dapat dilakukan oleh suatu negara ialah dengan melakukan hubungan diplomatik⁹ dengan negara-negara lainnya. Hubungan diplomatik

⁵ASEAN. 2017. "About ASEAN". Diakses dari <http://asean.org/asean/about-asean/> pada 19 Januari 2017

⁶Theguardian. 2010. "World education rankings: which country does best at reading, maths and science?". Diakses dari <https://www.theguardian.com/news/datablog/2010/dec/07/world-education-rankings-maths-science-reading#data> pada 19 Januari 2017

⁷UNESCO. 2015. "Education for All 2000-2015: achievements and challenges". France:United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Halaman 6

⁸*Ibid.*

⁹ Hubungan diplomatik adalah cara-cara dan bentuk yang dilakukan dalam pendekatan dan berunding dengan negara lain untuk mengembangkan hubungan antar negara. Miriam Budiardjo. 2008. "Dasar-dasar Ilmu Politik". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman 12

merupakan suatu hal yang penting bagi suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain dan perannya dalam hubungan internasional. Melalui kerjasama diplomatik suatu negara akan mendapatkan beberapa keuntungan diantaranya ialah keuntungan dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan, dan sosial budaya. Pada bidang politik manfaat yang dapat diperoleh ialah dapat mempererat hubungan dengan negara lain. Pada bidang ekonomi manfaat yang dapat diperoleh ialah mampu meningkatkan kerja sama dalam hal perdagangan barang dan jasa. Pada bidang pertahanan manfaat yang dapat diperoleh ialah mampu menghindari konflik dengan negara lain dan dapat menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Pada bidang sosial budaya manfaat yang dapat diperoleh ialah mampu memperkenalkan budaya dan melestarikan budaya yang dimiliki oleh suatu negara.¹⁰

Berkaitan dengan upaya negara dalam menjalin kerjasama diplomatik dengan negara-negara lainnya tidak jarang hal tersebut kemudian membentuk sebuah organisasi internasional dalam cakupan regional atau kawasan. *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) merupakan suatu bentuk kerjasama multilateral antar negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi yang dibentuk pada 8 Agustus 1967 ini memiliki tujuan untuk mempererat hubungan diplomatik antar negara di kawasan Asia Tenggara. Hubungan diplomatik yang terjalin dibawah ASEAN tidak hanya meliputi bidang politik saja, tetapi juga ekonomi, militer dan keamanan, sosial, budaya, serta pendidikan. Untuk mencapai tujuannya, ASEAN telah menetapkan tiga pilar komunitas utama yang masing-masing ialah pilar politik-keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya. Pilar Komunitas politik-keamanan ASEAN menangani peningkatan kerja sama di bidang politik dan keamanan untuk memelihara perdamaian serta memajukan nilai Hak Asasi Manusia dan demokratisasi di kawasan ASEAN. Pilar komunitas ekonomi ASEAN menangani upaya untuk memperdalam dan memperluas ekonomi terpadu di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN. Pilar komunitas sosial budaya ASEAN mencakup bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanganan bencana alam,

¹⁰*Ibid.*

kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, penanggulangan narkoba, peningkatan administrasi dan kepegawaian publik.¹¹

Ketiga pilar komunitas yang telah ditetapkan oleh *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) memiliki prioritas yang sama dan saling mempengaruhi antar satu dan lainnya. Tanpa pilar komunitas politik-keamanan maka stabilitas keamanan negara anggota ASEAN akan sulit diwujudkan, begitu pula dengan pilar komunitas ekonomi, dan pilar komunitas sosial budaya. Telah disebutkan oleh penulis pada bagian awal latar belakang karya ilmiah ini bahwa pendidikan merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu negara dan pendidikan juga termasuk dalam salah satu pilar komunitas ASEAN yaitu pilar komunitas sosial budaya. Oleh karena itu banyak manfaat yang diperoleh dari investasi diplomatik melalui pendidikan dan kebudayaan.

The Southeast Asian Minister of Education Organization (SEAMEO) adalah organisasi antar pemerintah regional yang didirikan pada tahun 1965 antara pemerintah negara-negara Asia Tenggara untuk mempromosikan kerja sama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan di wilayah tersebut.¹² Budaya merupakan warisan yang bersifat turun temurun dan salah satu cara untuk meregenerasikannya atau melestarikannya ialah dengan cara di perkenalkan melalui pendidikan, oleh karena itu budaya dan pendidikan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan kerap menjadi satu dalam berbagi program. SEAMEO memiliki kantor sekretariat yang terletak di Bangkok, Thailand dan memiliki 11 negara anggota, diantaranya ialah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, Filipina, Laos, Myanmar, Brunai Darrussalam, dan Timor Leste. Sama halnya dengan organisasi pada umumnya, SEAMEO juga memiliki visi dan misi. Visi SEAMEO ialah sebagai organisasi terkemuka untuk meningkatkan pemahaman regional dan kerjasama di bidang pendidikan, ilmu

¹¹Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. 2011. "Ayo Kita Kenali ASEAN". Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. Halaman 22

¹²*Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO). 2017. "What is SEAMEO?". Diakses dari <http://www.seameo.org> pada 20 Januari 2017

pengetahuan dan kebudayaan untuk kualitas hidup yang lebih baik di Asia Tenggara. Misi yang ingin diwujudkan oleh SEAMEO ialah untuk meningkatkan pemahaman regional, kerjasama dan kesatuan tujuan antara negara anggota untuk kualitas hidup yang lebih baik melalui pembentukan jaringan dan kemitraan, penyediaan forum antara pembuat kebijakan dan para ahli, dan promosi pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.¹³

Selain visi dan misi yang telah disebutkan tersebut, SEAMEO juga memiliki sembilan tujuan yang ingin dicapai, diantaranya ialah (1). mengembangkan pusat-pusat unggulan regional, (2). menyediakan program yang relevan dan responsif yang membahas isu-isu nasional dan regional di bidang SEAMEO, (3). memperkuat kemampuan organisasi dalam memulai dan mengelola perubahan dan pengembangan guna memenuhi tantangan globalisasi, (4). memastikan kelayakan keuangan lanjutan, (5). mempromosikan penelitian dan pengembangan atau *Research and Development* (R & D) di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya dan meningkatkan mekanisme diseminasi, (6). meningkatkan kolaborasi antara negara anggota dan organisasi terkait, (7). menjadi mitra strategis ASEAN untuk kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, (8). memfasilitasi pengembangan penyesuaian standar pendidikan, (9). menjadi pemimpin regional dalam kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.¹⁴ Guna mencapai tujuan tersebut, SEAMEO telah membentuk 21 lembaga spesialisasi yang selanjutnya disebut sebagai SEAMEO *center* dan masing-masing berada di negara anggota SEAMEO.¹⁵

Telah dijelaskan bahwa SEAMEO memiliki peranan yang cukup penting dalam perkembangan pendidikan di kawasan Asia Tenggara terutama dalam menyiapkan MEA 2015, SEAMEO memfasilitasi SMK di seluruh kawasan Asia Tenggara, dan bersinergi dengan *technical college* dari Thailand, Kamboja, Vietnam, Filipina, Laos dan Myanmar. Kegiatan ini dilakukan oleh salah satu

¹³*Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO). 2017. "What is SEAMEO?". Diakses dari <http://www.seameo.org> pada 20 Januari 2017

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

SEAMEO *Center* yakni SEAMOLEC. Sebelum adanya MEA, SEAMOLEC telah mengembangkan inovasi baru dalam dunia pendidikan yang dikenal dengan *SEALanguage 1.0*, dengan memanfaatkan android untuk belajardua bahasa asing, sebagai salah satu prasyarat untuk bisa berkomunikasi dengan negara tetangga. Di samping itu SEAMOLEC juga telah menyiapkan *website* dan aplikasi dengan topik pendidikan di negara-negara seperti China, Vietnam, Thailand, Laos, Jerman, Korea, Filipina, Kamboja, Myanmar, Jepang, dan Rusia.¹⁶Selain itu, SEAMEO juga telah mempersiapkan mutu dan kualitas tenaga pengajar melalui SEAMEO QITEP pada tahun 2014. Melalui *SEAMEO QITEP in Science* akhirnya untuk pertama kalinya diselenggarakan hibah dana bantuan penelitian pada tahun dengan jumlah proposal penelitian yang lolos sebanyak 15 (lima belas) buah. Melalui proposal penelitian yang diajukan tersebut nantinya akan dapat menghasilkan tenaga pengajar yang lebih berkualitas di kawasan Asia Tenggara.

Selain pilar komunitas sosial budaya, ASEAN juga memiliki sebuah agenda utama yang berkaitan dengan salah satu pilar komunitasnya, yakni pilar komunitas ekonomi. Agenda tersebut ialah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community* (AEC). Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan sebuah agenda perekonomian utama di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan untuk mengintegrasikan ekonomi. Integrasi ekonomi berarti upaya-upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir segala hambatan dalam kegiatan perekonomian antar kawasan Asia Tenggara. satu ciri utama yang sangat erat dengan MEA ialah adanya perdagangan bebas (*free trade*). Perdagangan bebas adalah sebuah pasar global yang terbuka dimana barang dan jasa bisa bergerak bebas melewati batas-batas negara. Bebas yang dimaksud ialah tidak adanya hambatan-hambatan dalam perdagangan. Dalam perdagangan yang dilakukan antar negara dikenal istilah bea masuk impor yang dikenakan kepada barang atau jasa impor yang memasuki suatu negara, selain itu ada pula pajak ekspor yang dikenakan atas penjualan barang ke

¹⁶ Gatot Hari Priowirjanto. 2014. "SEAMEOLEC Magazine: Menyiapkan Strategi Pendidikan Masa Depan". Jakarta: SEAMOLEC. Halaman 8

luar negeri. Kedua hal tersebut merupakan hambatan-hambatan tarif dalam perdagangan internasional.¹⁷

Selain hambatan tarif, ada pula hambatan non-tarif, seperti penetapan kouta barang atau jasa yang diimpor, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu barang atau jasa boleh diimpor, dan subsidi yang harus diberikan kepada produsen dalam negeri. Hambatan semacam ini, baik tarif maupun non-tarif akan menghambat perdagangan antar negara sehingga upaya untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi negara akan terhambat. Solusi yang ditawarkan adalah dengan meminimalkan atau bahkan menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Caranya adalah dengan membentuk perjanjian perdagangan bebas, baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh organisasi internasional yang mendorong perdagangan bebas antar negara anggotanya. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu contoh perdagangan bebas yang dibentuk oleh organisasi kawasan.¹⁸

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah diberlakukan di negara anggota ASEAN sejak 31 Desember 2015.¹⁹ Nantinya diharapkan kawasan Asia Tenggara dapat menjadi pasar dengan 600 juta penduduk. Keberhasilan MEA tentu sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, dan telah disebutkan pula oleh penulis bahwa perekonomian dan pendidikan merupakan dua hal yang erat kaitannya dan saling mempengaruhi antar satu dan lainnya. Adanya organisasi yang berkaitan dengan kerja sama dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya atau dikenal dengan SEAMEO tentunya dapat menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas sehingga mampu bersaing dalam era perdagangan bebas.²⁰

¹⁷The ASEAN Secretariat. 2015. "ASEAN Economic Community". Jakarta: *The ASEAN Secretariat Public Outreach and Civil Society Division*. Halaman 2-3

¹⁸ Dwi Siswaningsih. 2015. "Peluang dan Tantangan Indonesia Pasar Bebas Asean". Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. halaman 2-3

¹⁹ Siow Yue Chia. 2013. "The ASEAN Economic Community: Progress, Challenges, and Prospects". *ADB Working Paper Series*. No. 440. Jepang: Asian Development Bank Institute. Halaman 10-13

²⁰*Ibid.*

Pendidikan menjadi sebuah bahasan yang menarik untuk dianalisis karena melalui pendidikan akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu untuk bersaing. Hal ini ditambah lagi, saat ini kawasan Asia Tenggara tengah menghadapi sebuah era baru dalam dunia perdagangan yang dikenal dengan istilah MEA. Kualitas sumber daya manusia tentunya lebih diutamakan karena persaingan antar negara semakin ketat. Persaingan tidak lagi hanya melibatkan wilayah domestik negara saja, tetapi telah berkembang kearah persaingan antar negara dalam satu kawasan. Pendidikan dan era MEA merupakan dua hal yang sangat erat kaitannya dan saling mempengaruhi antar satu dan lainnya. Terbatasnya analisa mengenai MEA pada masalah-masalah seputar ekonomi dan perdagangan internasional membuat karya ilmiah ini berbeda dengan karya ilmiah lainnya karena dalam karya ilmiah ini penulis mencoba untuk menjelaskan bagaimana kaitan antara pendidikan dan MEA.

Penerapan aturan tentang integrasi ekonomi yang ditandai dengan perdagangan bebas (*free trade*) di kawasan Asia Tenggara sejak bulan Desember 2015 telah menyebabkan semakin luasnya pasar dan beragamnya konsumen di kawasan tersebut. Akibatnya, tuntutan akan sumber daya manusia yang lebih berkualitas guna menghadapi persaingan yang semakin mengglobal pada tingkat regional semakin besar pula. Oleh karena itu, adanya organisasi ASEAN dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya yakni SEAMEO diharapkan mampu menunjukkan perannya dalam menciptakan sumber daya manusia yang lebih terampil serta mampu bersaing pada era MEA. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang upaya SEAMEO dalam meningkatkan mutu pendidikan di kawasan Asia Tenggara sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pada era MEA maka dipilih judul sebagai berikut:

**UPAYA SOUTHEAST ASIAN MINISTER OF EDUCATION (SEAMEO)
DALAM USAHA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI WILAYAH
ASIA TENGGARA PADA ERA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Analisa pada ilmu Hubungan Internasional memerlukan suatu ruang lingkup pembahasan yang jelas. Ruang lingkup pembahasan dapat diartikan sebagai hal-hal yang menjadi batasan penulis dalam menganalisa permasalahan dalam tulisannya. Tujuannya adalah untuk memudahkan penulis dalam membuat analisisnya agar lebih fokus pada pokok permasalahan. Ruang lingkup pembahasan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi sangat berguna dalam proses penulisan sebuah karya ilmiah. Melalui batasan materi, penulis lebih membahas hal-hal yang menjadi pokok bahasannya sehingga tidak akan keluar dari bahasan yang seharusnya dilakukan. Pada penulisan karya ilmiah ini materi yang akan dikumpulkan terbatas pada berbagai aspek yang berkaitan dengan organisasi regional yang bekerja sama dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya atau yang lebih dikenal dengan *Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO) dan diterapkannya aturan pengintegrasian ekonomi di kawasan Asia Tenggara atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Fokusnya adalah tentang upaya yang dilakukan oleh SEAMEO dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Asia Tenggara guna menghasilkan sumber daya yang lebih berkualitas agar mampu bersaing pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu diperlukan untuk mengkaji rentang waktu yang dikaji penulis dalam karya ilmiahnya. Rentang waktu dalam karya ilmiah ini adalah tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Tahun 2015 dipilih sebagai titik awal karena pada tahun ini MEA diterapkan oleh negara anggota ASEAN. Tahun 2017 dipilih sebagai titik akhir karena pada tahun ini diberlakukan program tujuh prioritas area atau *seven priority areas* yang dibentuk oleh SEAMEO sebagai cara untuk meningkatkan mutu pendidikan di kawasan Asia Tenggara.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian muncul karena adanya kesenjangan antara fakta empiris dengan harapan yang diinginkan. Dari rumusan masalah ini, nantinya dapat diketahui tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Selain itu, dari rumusan masalah juga dapat ditentukan argumen utama. Definisi rumusan masalah sendiri adalah serangkaian pertanyaan yang dijadikan dasar pijakan bagi penulis untuk menentukan berbagai desain dan strategi penelitiannya.²¹

Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan suatu peluang sekaligus tantangan yang harus di hadapi oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pada era ini diharapkan negara-negara anggota ASEAN mampu bersaing dalam hal perekonomian sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan negara. Hanya akan ada dua kemungkinan yang terjadi pada era MEA, yakni menjadi negara pasif atau menjadi negara yang berperan aktif dalam MEA. Negara yang pasif ialah negara yang tidak mampu mengambil peluang atas adanya pengintegrasian ekonomi di kawasan Asia Tenggara, akibatnya negara tersebut hanya menjadi penonton MEA. Negara yang berperan aktif ialah negara yang mampu menjawab tantangan sekaligus mengambil peluang dari adanya pengintegrasian ekonomi di kawasan Asia Tenggara sehingga sukses menjadi pasar sekaligus konsumen pada era MEA. Salah satu upaya yang mampu dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN ialah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas agar mampu bersaing di era MEA. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas maka diperlukan mutu dan kualitas pendidikan yang baik pula. Berkaitan dengan hal ini, ASEAN sebenarnya telah membentuk sebuah organisasi yang bekerja sama dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya, yakni *Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO). Organisasi ini sebenarnya telah dibentuk oleh ASEAN sejak tahun 1965.

²¹Muhammad Idrus. 2009. "*Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*". Yogyakarta: Erlangga. Halaman 48

Tingkat pertumbuhan dan Pembangunan negara yang berbeda-beda menyebabkan kondisi sosial ekonomi yang berbeda pula antar negara anggota ASEAN. Akibatnya mutu pendidikan juga berbeda-beda antar negara anggota ASEAN. Berhubungan dengan hal-hal tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana Upaya *Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO) dalam Usaha Meningkatkan Mutu Pendidikan di Wilayah Asia Tenggara pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)?”

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, tujuan yang ingin dicapai harus sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis rangkaian upaya yang dilakukan oleh *Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO) dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Asia Tenggara pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

1.5 Landasan Pemikiran

Landasan pemikiran adalah konsepsi umum dalam menganalisa permasalahan dan berguna sebagai alat untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat oleh penulis melalui sudut pandang tertentu. Kerangka konseptual disini mencakup konsep dan teori. Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak.²² Sedangkan teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antarkonsep.²³ Pada penelitian ini digunakan konsep Regionalisme dan teori Organisasi Internasional.

Dalam rangka menjawab permasalahan pada penelitian ini, perlu dijelaskan bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah membawa dunia pada

²² Muhammad Idrus, *Op. Cit.*, 17

²³*Ibid.*

sebuah era yang dikenal dengan globalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk menciptakan pola tunggal baik di ranah ekonomi, politik, maupun teknologi. Tujuan globalisasi sebenarnya adalah untuk menghapuskan segala bentuk hambatan sehingga negara-negara dapat berinteraksi melintasi batas-batas negara. Tidak semua negara mampu beradaptasi dengan era globalisasi, terutama negara-negara berkembang. Oleh karena itu, negara-negara berkembang membentuk kelompok-kelompok regional guna mengurangi dampak langsung dari globalisasi. Upaya negara-negara dalam satu kawasan untuk membentuk sebuah organisasi regional kemudian dikenal dengan istilah regionalisasi. Tujuan dibentuknya regionalisasi adalah untuk membentengi diri dari terpaan globalisasi secara langsung atau mengurangi persaingan secara langsung dengan negara-negara yang sangat berbeda levelnya.²⁴

Association of South East Asia Nations (ASEAN) merupakan contoh organisasi regional yang dibentuk oleh negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Adanya ASEAN diharapkan mampu membentengi negara-negara di kawasan Asia Tenggara dari persaingan secara langsung dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan negara-negara Eropa. ASEAN telah menerapkan program pengintegrasian ekonomi kawasan atau dikenal dengan MEA semenjak Desember 2015. Adanya MEA diharapkan bahwa negara anggota ASEAN mampu mempersiapkan diri untuk bersaing dengan negara maju lainnya. Upaya yang dapat dilakukan oleh negara anggota ASEAN agar mampu bersaing ialah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada di negaranya masing-masing. Berkaitan dengan hal ini, ASEAN sebenarnya telah membentuk sebuah organisasi kerjasama dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya, yakni *Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO). Adanya

²⁴APEC Secretariat. 1997. *"The Impact of Trade Liberalization"*. Singapura: APEC Secretariat. Halaman 1-3

SEAMEO tentunya dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di kawasan Asia Tenggara.²⁵

Rangkaian upaya yang dilakukan oleh SEAMEO merupakan fokus dalam penelitian ini dan untuk menjelaskannya penulis menggunakan teori organisasi internasional dimana penulis lebih memfokuskan pada pembahasan mengenai peran dan fungsi organisasi internasional. Menurut teori ini, peran dan fungsi organisasi internasional terbagi menjadi tiga yaitu sebagai instrumen, sebagai arena, dan sebagai aktor independen yang menyediakan forum komunikasi. Penjelasan mengenai upaya yang dilakukan oleh SEAMEO diuraikan oleh penulis pada bab empat. Sebelum menjelaskan upaya yang dilakukan oleh SEAMEO dengan menggunakan teori organisasi internasional, penulis terlebih dahulu menjelaskan upaya negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk membentuk sebuah organisasi regional yang kemudian menerapkan MEA dengan menggunakan konsep regionalisme. Uraian mengenai upaya pembentukan regionalisasi di kawasan Asia Tenggara ini dirasa penting oleh penulis dan sebenarnya merupakan penjelasan pendukung guna memperkuat analisa penulis. Penjelasan ini diuraikan secara lebih lanjut dalam bab tiga. Perlu penulis jelaskan bahwa konsep regionalisme digunakan oleh penulis sebagai pendekatan terhadap kasus yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan kasus dalam penelitian ini merupakan studi kawasan atau regional.

1.5.1 Konsep Regionalisme

Berawal dari sebuah pemikiran yang paling mendasar bahwa manusia merupakan makhluk sosial sehingga dalam perkembangannya manusia selalu membutuhkan orang lain untuk keberlangsungan hidupnya. Pemikiran ini kemudian di generalkan kedalam suatu bentuk yang lebih kompleks lagi yang disebut dengan negara. Sama halnya dengan manusia, suatu negara juga tidak mampu memenuhi semua kebutuhan dalam negerinya sendiri. Setiap negara pasti membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dikarenakan

²⁵*Southeast Asian Minister of Education Organization (SEAMEO)*. 2017. "What is SEAMEO?". Diakses dari <http://www.seameo.org> pada 21 Januari 2017

potensi yang dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda, ada negara yang apabila dilihat dari segi potensi sumber daya manusianya dapat dikatakan sudah memadai seperti misalnya negara-negara maju (negara industri). Tetapi, ada juga negara yang apabila ditinjau dari segi potensi sumber daya manusianya masih belum dapat dikatakan memadai dan sebaliknya, apabila ditinjau dari segi potensi sumber daya alamnya negara tersebut dapat dikatakan sangat memadai seperti misalnya negara-negara berkembang.²⁶

Adanya konsep atau pemikiran seperti di atas tersebut, ditambah lagi dengan kemajuan zaman seperti saat ini dimana kebutuhan manusia dan dalam cakupan yang lebih besar lagi yaitu negara semakin berkembang dan kompleks sehingga negara dituntut untuk selalu memenuhi kebutuhan dalam negerinya (manusia). Kebutuhan tersebut semakin hari semakin meningkat dan beragam seiring dengan perkembangan zaman, sedangkan tidak ada satupun negara di dunia ini yang mampu memenuhi semua kebutuhan dalam negerinya sendiri atau dengan kata lain, tidak ada negara yang tidak membutuhkan negara lain. Fenomena-fenomena seperti yang telah disebutkan, menyebabkan munculnya kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara tentunya sudah menjadi hal yang wajar dan sudah semestinya dilakukan ketika suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Ada banyak sekali bentuk-bentuk kerjasama, tetapi dalam hal ini yang menjadi fokus perhatian ialah kerjasama yang melingkupi suatu kawasan (*regional*) tertentu atau lebih dikenal dengan Regionalisme.²⁷

Regionalisme bukanlah istilah yang asing lagi dalam studi Hubungan Internasional. Secara bahasa, istilah Regionalisme berasal dari kata *Region* (wilayah atau kawasan) dan *isme* (faham atau ajaran). Jadi kata lain dari Regionalisme ialah studi tentang suatu kawasan. Rick Fawn yang menyatakan bahwa memang secara geografi *region* adalah sebuah entitas subnegara yang memiliki batas-batas yang membedakannya dari kawasan yang lain. Berdasarkan pendapat Fawn dapat dikatakan bahwa dalam regionalisme ada batasan-batasan

²⁶Rick Fawn. 2009. “‘Regions’ and their study: wherefrom, what for and whereto?”. *Review of International Studies*. Vol. 35 No. 5-34. British: Cambridge Journal. Halaman 5

²⁷*Ibid.* Halaman 6

baik itu sengaja diciptakan oleh para anggotanya ataupun tidak sehingga membedakannya dengan kerjasama regional lainnya. Batasan-batasan ini pada akhirnya akan menciptakan suatu ciri khas tertentu dari sebuah kerjasama regional.²⁸ Ciri khas tersebut dapat berupa, tujuan, kesamaan perilaku antar anggota, serta peraturan yang telah ditetapkan bersama. Ciri khas yang ada pada suatu regionalisme tentunya akan berbeda dengan regionalisme yang lainnya. Perbedaan inilah yang pada akhirnya akan sedikit menyulitkan antar negara anggota dari regionalism yang berbeda untuk melakukan kerjasama serupa seperti pada kerjasama regionalisme. Selain itu, menurut John Ravenhill *regions are social construction whose members define their boundaries* dan *Regions are refers to a formal process of intergovernmental collaboration between two or more state.*²⁹ Menurut Ravenhill, regionalisme merupakan sebuah konstruksi sosial dimana negara anggotanya mendefinisikan adanya batasan-batasan yang ada sehingga batasan tersebut membedakannya dengan regionalism lainnya. Pendefinisian ini ditandai dengan adanya kolaborasi yang formal antar negara anggota.

Pendapat dari kedua tokoh tersebut pada intinya ialah sama, yakni mengacu pada batasan-batasan yang ditimbulkan dari adanya sebuah kerjasama regionalisme. Batasan tersebut nantinya akan menghalangi munculnya suatu kekuatan tunggal atau global seperti yang diinginkan oleh globalisasi. Terhalangnya kekuatan tunggal ini karena adanya pengelompokan berdasarkan suatu regionalisme tersebut. Pengelompokan ini akan membentuk unit-unit yang lebih kompleks lagi. Fenomena globalisasi pada akhirnya memang tidak dapat diabaikan begitu saja. Pada dasarnya globalisasi itu tetap berjalan akan tetapi sedikit mengalami kesulitan dengan adanya regionalisme.

Konsep regionalisme kerap kali disamakan atau diburamkan dengan masuknya konsep lain yaitu globalisasi. Hal ini karena kedua konsep tersebut sama-sama bergerak dalam hal atau cakupan yang luas seperti ekonomi, sosial, politik,

²⁸Rick Fawn. 2009. "Regions' and their study: wherefrom, what for and whereto?". *Review of International Studies*. Vol. 35 No. 5-34. British: Cambridge Jornal. Halaman 6-7

²⁹John Ravenhill. 2004. "Regionalism". Diakses dari <http://hamdoucheriad.yolasite.com> pada 23 Januari 2017

budaya, militer dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting dalam hal ini ialah, bagaimana hubungan antara regionalisme dan globalisasi. Apakah Regionalisme itu memperlancar atau memudahkan globalisasi atau sebaliknya, regionalisme itu justru menghambat globalisasi.

Regionalisme dikatakan memperlancar globalisasi karena regionalisme itu mendukung adanya kerjasama yang menyebabkan semakin tingginya kebebasan individu untuk melakukan interaksi atau kerjasama. Apabila individu semakin bebas tentunya proses untuk mencapai globalisasi akan semakin terbuka. Regionalisme dikatakan menghambat globalisasi karena regionalisme itu justru mengkotak-kotakkan (mengelompokkan) negara yang berada di suatu kawasan tertentu. Hal ini tentunya akan membatasi interaksi antara kawasan yang satu dengan kawasan yang lainnya. Suatu negara atau individu dinegara tertentu akan sulit untuk masuk kedalam kerjasama negara lain yang bukan regionnya. Apabila hal ini terjadi maka akan menghambat tujuan globalisasi yaitu menciptakan suatu keteraturan yang menggloabal atau tunggal.³⁰

1.5.2 Teori Organisasi Internasional

Organisasi Internasional merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional, disamping negara, *non-governmental organizations* (NGOs), *Multinational Corporations* (MNC), dan individu. Peranan suatu organisasi internasional dalam hubungan internasional sangatlah penting, karena dapat dijadikan sebagai wadah atau forum yang berisi norma dan peraturan-peraturan antar negara anggota guna mencapai sebuah tujuan bersama. Pemikiran tentang organisasi internasional sebenarnya telah ada sejak zaman Yunani Kuno, dimana pada saat itu tengah berkembang sistem negara-kota di Yunani Kuno (*Ancient Greece*). Hal ini bisa dibuktikan dari tulisan Thucydides yang menulis tentang Perang Peloponesia (431-404 SM) antara Sparta dan Athena.³¹ Dalam tulisannya

³⁰Rick Fawn. Op. Cit., halaman 8

³¹UNChronicle. 2014. "From the Congress of Vienna to Present-Day International Organizations". Diakses dari <https://unchronicle.un.org/article/congress-vienna-present-day-international-organizations> pada 23 Januari 2017

ini, digambarkan hal-hal seperti perundingan, perjanjian, aliansi, dan pola kerja sama, serta adanya ketergantungan pertahanan-keamanan regional, yang kesemuanya tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk sederhana dari kerja sama internasional yang selalu dibutuhkan dalam organisasi internasional.

Munculnya organisasi internasional didasarkan atas sifat alamiah manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan peranan dari pihak lain untuk dapat bertahan hidup. Begitu pula dengan negara yang merupakan tempat berkumpulnya sekelompok besar individu pada wilayah yang sama. Ketidakmampuan suatu negara untuk memenuhi segala kebutuhan dalam negerinya menyebabkan negara tersebut melakukan interaksi dengan negara yang lainnya. Interaksi yang terjalin umumnya berupa kerja sama antar negara. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kebutuhan suatu negara untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan negara lainnya kemudian menyebabkan munculnya organisasi internasional.

Organisasi internasional adalah suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Menurut Clive Archer, peranan organisasi internasional dibagi menjadi tiga kategori, yaitu (1). sebagai instrumen, organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya, (2). sebagai arena, organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang di hadapi, (3). sebagai aktor independen yang menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah sehingga penyelerasan lebih mudah tercapai. Selain peranan tersebut, organisasi internasional juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya ialah, (1). fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan, (2). fungsi sosialisasi, (3). fungsi rekrutmen, (4). fungsi transaksi (termasuk komunikasi di dalamnya), (5). fungsi pembuatan aturan (*rule*

making): prosedural dan substansif, (6). fungsi penerapan aturan (*rule application*), dan (7). fungsi pengawasan aturan (*rule supervision*).³²

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan permasalahan dan landasan pemikiran yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, argumen utama penulis adalah:

Mengacu pada teori organisasi internasional yang difokuskan pada peran dan fungsi organisasi internasional, penulis berpendapat bahwa upaya yang dilakukan oleh *Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO) dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Asia Tenggara pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ialah dengan menerapkan program *seven priority areas* yaitu Perawatan Pendidikan Anak Usia Dini atau *Early Childhood Care and Education*, Mengatasi Hambatan dalam Pendidikan atau *Addressing Barriers to Inclusion*, Memastikan Ketahanan dalam Keadaan Darurat atau *Ensuring Resiliency in the Face of Emergencies*, Mempromosikan Teknis dan Pelatihan Pendidikan atau *Promoting Technical and Vocational Education and Training*, Revitalisasi Tenaga Pengajar (Guru) atau *Revitalising Teacher Education*, Mempromosikan Penyelarasan dalam Pendidikan Tinggi dan Bidang Penelitian atau *Promoting Harmonisation in Higher Education and Research* , serta Mengadopsi Kurikulum Abad ke-21 atau *Adopting a 21st Century Curriculum*.

1.7 Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah tentu memiliki metode penelitian yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Metode penelitian itu sendiri berarti cara-cara yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan penelitiannya, karena itu metode yang digunakan tergantung pada analisis penulis. Melalui metode penelitian ini, nantinya berguna mengarahkan jalannya penelitian yang dilakukan

³² Ananda Ruriska Saputri. 2014. Peran ASEAN Intergovernmental Commission Of Human Rights (AICHR) dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia di Kawasan Negara Anggota ASEAN. *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 1 No. 2. Samarinda: Universitas Mulawarman. Halaman 247

oleh penulis.³³ Jalan penelitian yang dimaksud dalam hal ini adalah, sebuah proses atau langkah-langkah yang tepat dan dirancang untuk mengarahkan penulis pada jawaban dari permasalahan yang ingin dianalisis. Penulis menggunakan dua metode penelitian dalam karya ilmiah ini. Kedua metode tersebut adalah metode pengumpulan data dan metode analisa data. Metode pengumpulan data merupakan sebuah teknik untuk mencari dan mengumpulkan data sesuai dengan permasalahan. Metode analisa data merupakan cara yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis permasalahan.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Data dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh penulis dalam penulisan.³⁴ Data yang digunakan penulis dalam karya tulis ini ialah data sekunder. Dalam penelitian kualitatif, data sekunder pada umumnya merupakan berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) baik yang dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan.

Dalam mendapatkan data-data tersebut, penulis melakukan penelitian di beberapa tempat, antara lain:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember

Sedangkan penulis mendapatkan sumber-sumber informasi dari:

1. Buku
2. Surat Kabar
3. Internet
4. Jurnal

1.7.2 Teknik Analisis Data

Teknik atau metode yang digunakan untuk menganalisis data ialah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif

³³ Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Halaman 43. Yogyakarta: Erlangga

³⁴ Muhammad Idrus, *Op.Cit.*, halaman 61

merupakan salah satu metode yang digunakan peneliti dalam ilmu sosial, dengan penekanan objek penelitiannya terhadap keunikan manusia. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, akurat atas data dan fakta yang telah terkumpul untuk diteliti dengan dilakukan pemilahan data, pengkajian dan interpretasi terlebih dahulu. Kemudian untuk menganalisis data dan permasalahan yang ada penulis menggunakan teknik berpikir induktif. Induktif merupakan teknik berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus berupa data dan fakta yang telah terkumpul kemudian didapatkan hasil yang bersifat umum atau didapatkan hasil kesimpulan.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan pemikiran, argumen utama, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2. Pembentukan *Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO) dan Berlakunya Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015

Bab ini menguraikan pembentukan *Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO) dan berlakunya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama menjelaskan *Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO) dan sub bab kedua menjelaskan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

2.1 *Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO)

2.2 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Bab 3. Pendidikan di Asia Tenggara

Bab ini menuraikan pendidikan di negara-negara kawasan Asia Tenggara dan terbagi menjadi sebelas sub bab.

3.1 Pendidikan di Indonesia

3.2 Pendidikan di Malaysia

- 3.3 Pendidikan di Singapura**
- 3.4 Pendidikan di Thailand**
- 3.5 Pendidikan di Filipina**
- 3.6 Pendidikan di Brunei Drrussalam**
- 3.7 Pendidikan di Myanmar**
- 3.8 Pendidikan di Kamboja**
- 3.9 Pendidikan di Laos**
- 3.10 Pendidikan di Vietnam**
- 3.11 Pendidikan di Timor Leste**

Bab 4. Program Tujuh Prioritas Area (*Seven Priority Agenda*) SEAMEO

Bab ini berisi analisis program tujuh prioritas area SEAMEO dengan menggunakan teori organisasi internasional. Berisi delapan sub bab, masing-masing sebagai berikut:

4.1 *Early Childhood Care and Education*

Upaya untuk mencapai pendidikan dasar bagi anak usia dini pada tahun 2030 dengan target utama pada anak-anak kurang mampu, masyarakat pedesaan, dan anak-anak kaum minoritas etnis.

4.2 *Addressing Barriers to Inclusion*

Mengatasi segala hambatan yang dapat menyebabkan terganggunya kesempatan belajar bagi anak usia dini melalui upaya inovasi dan perbaikan kualitas manajemen mengajar.

4.3 *Ensuring Resiliency in the Face of Emergencies*

Mempersiapkan para pemimpin sekolah, guru, dan siswa dalam mengelola dan mempertahankan pelayanan pendidikan selama keadaan darurat seperti konflik, dan bencana alam.

4.4 *Promoting Technical and Vocational Education and Training*

Mempromosikan pelatihan teknis dan keterampilan pendidikan kepada peserta didik, guru, dan orang tua.

4.5 *Revitalising Teacher Education*

Menjadikan profesi mengajar sebagai pilihan yang utama melalui melalui reformasi yang komprehensif, strategis, dan praktek berbasis manajemen.

4.6 *Promoting Harmonisation in Higher Education and Research*

Harmonisasi lembaga pendidikan di tingkat Asia Tenggara guna memperkuat lembaga-lembaga pendidikan dan dapat mengkoordinasikan standar kualitas pendidikan.

4.7 *Adopting a 21st Century Curriculum*

Analisis sistematis pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan secara efektif untuk merespon perubahan konteks global, terutama kompleksitas lingkungan ekonomi, sosial budaya, dan politik di kawasan Asia Tenggara.

4.8 *Tantangan dan Hambatan yang di Hadapi Oleh Southeast Asian Minister of Education Organization (SEAMEO) pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*

Bab 5. Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan sebagai penutup dari keseluruhan skripsi yang menjawab permasalahan.

BAB. 2 PEMBENTUKAN *SOUTHEAST ASIAN MINISTER OF EDUCATION ORGANIZATION* (SEAMEO) DAN BERLAKUNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) PADA TAHUN 2015

Perlu dijelaskan bahwa, dunia saat ini berada dalam era globalisasi. Era dimana proses untuk menciptakan pola tunggal baik di ranah ekonomi, politik, maupun teknologi merupakan hal yang menjadi prioritas utama negara-negara di dunia. Adanya globalisasi tentu memiliki dampak positif dan negatif. Bagi negara maju, era globalisasi kerap dijadikan sebuah ajang untuk memperkuat eksistensi negara mereka baik dalam hal perdagangan, keamanan, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya. Sedangkan bagi negara yang berkembang atau bahkan negara yang kurang maju, era globalisasi menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk memacu kinerja bangsa agar dapat bertahan di tengah eksistensi nagara-negara besar atau sebaliknya, negara berkembang hanya menjai penonton era globalisasi. Tidak dapat menjdai aktor yang memainkan peran penting dalam era globalisasi tetapi hanya menjadi negara yang mengkonsumsi semua prouk-prouk era globalisasi.

Kemunculan globalisasi pada akhirnya membawa dunia pada suatu tatanan baru khususnya dalam bidang perekonomian, yaitu perdagangan bebas (*fair trade*). Rezim perdagangan bebas memaksa semua negara untuk tunduk pada sejumlah aturan internasional tersebut. Dalam kondisi globalisasi ini negara-negara di kawasan membentuk kelompok-kelompok regional guna mengurangi dampak negatif dari globalisasi. Tujuan dibentuknya regionalisasi adalah untuk membentengi diri dari terpaan globalisasi secara langsung atau mengurangi persaingan secara langsung dengan negara-negara yang sangat berbeda levelnya. Namun demikian, intinya globalisasi maupun regionalisasi pada dasarnya sama-sama merupakan proses liberalisasi. Regionalisasi juga dapat dikatakan sebagai sebuah proses untuk mengintegrasikan negara-negara dalam suatu kawasan agar bersatu sehingga mampu untuk menghadapi persaingan yang lebih kompleks lagi, yaitu globalisasi.

Hal-hal tersebut juga menjadi dasar bagi negara-negara di Kawasan Asia Tenggara untuk mengupayakan terbentuknya integrasi kawasan. Telah diketahui

bahwa sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara merupakan negara berkembang dan sedang berkembang. Adanya integrasi kawasan yang ditawarkan oleh regionalisme merupakan sebuah tawaran menarik yang nantinya akan sangat berguna bagi masa depan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan kawasan ialah melalui kerjasama regional. Jauh sebelum ASEAN dibentuk, negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah mengupayakan berbagai kerjasama regional untuk mengintegrasikan kawasan. Beberapa kerjasama regional yang pernah tercipta sebelum ASEAN dibentuk ialah, *Association of Southeast Asia (ASA)*, *Malaya, Philipina, Indonesia (MAPHILINDO)*, *South East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)*, *South East Asia Treaty Organization (SEATO)*, dan *Asia and Pasific Council (ASPAC)*.

Kendati telah melakukan berbagai kerjasama regional, namun upaya tersebut ternyata belum mampu untuk mengintegrasikan kawasan Asia Tenggara. Barulah pada tahun 1967, Asia Tenggara secara resmi dapat mengintegrasikan kawasannya melalui sebuah organisasi yang dikenal dengan ASEAN. Pembentukan ASEAN membuat upaya Asia Tenggara untuk mengintegrasikan kawasan menjadi lebih mudah dan terarah. Penulis menyimpulkan bahwa kegagalan upaya-upaya untuk mengintegrasikan kawasan Asia Tenggra terdahulu dikarenakan permasalahan dalam hubungan diplomatik antar negara belum sekompleks seperti akhir-akhir ini. Selain itu organisasi ASEAN juga lebih mencakup segala aspek kehidupan bangsa apabila dibandingkan dengan organisasi terdahulunya.

Berkaitan dengan proses globalisasi dan regionalisasi, satu hal yang tidak dapat dilupakan ialah pentingnya akan sumber daya manusia yang ada di masing-masing negara ASEAN. Masyarakat merupakan unsur penting dalam sebuah negara. Hal ini dikarenakan segala tindakan dan perilaku negara ditentukan oleh individu (masyarakat) negara itu sendiri. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah manusia yang memiliki kualitas tinggi. Hal ini dapat tercapai salah satunya ialah melalui proses pendidikan. Telah disebutkan bahwa pendidikan merupakan suatu

cara memberadabkan manusia, melalui pendidikan akan dihasilkan manusia-manusia yang memiliki pengetahuan tinggi.

Perhatian negara-negara di kawasan Asia Tenggara terhadap masalah pendidikan sebenarnya telah dibuktikan dengan adanya SEAMEO. SEAMEO merupakan sebuah organisasi kawasan di Asia Tenggara yang khusus menangani masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Meskipun secara *history* upaya SEAMEO dapat dikatakan gagal untuk mengintegrasikan kawasan Asia Tenggara melalui bidang pendidikan, namun peran SEAMEO masih berjalan hingga saat ini dan masih sangat berpengaruh bagi perkembangan pendidikan di Asia Tenggara.³⁵

Telah disebutkan diawal bahwa tujuan negara-negara dalam suatu kawasan untuk membentuk mengintegrasikan kawasan dengan cara membentuk kerjasama regional adalah untuk mempersiapkan diri guna menghadapi persaingan yang lebih kompleks lagi yaitu globalisasi. Untuk itu, pada tanggal 31 Desember 2015 ASEAN secara resmi memberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA dapat dikatakan sebagai langkan bersama ASEAN untuk mempersiapkan negara anggotanya dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara maju. Adanya MEA juga menuntut sumber daya manusia yang lebih berkualitas sehingga mampu bersaing dengan negara anggota ASEAN lainnya.³⁶

Uraian-uraian tersebut menjadi landasan penulis dalam menganalisa lebih lanjut mengenai pembentukan *Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO) dan diberlakukannya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Asia Tenggara. Sesuai dengan penjelasan dalam bab 1, pada bagian ini penulis menganalisa pembahasan dengan menggunakan konsep regionalisme. SEAMEO dan diberlakukannya MEA sebagai produk dari ASEAN dapat dijelaskan sebagai proses regionalisasi yang ada di kawasan Asia Tenggara. Bab ini terbagi kedalam dua bagian atau sub bab, sub bab pertama menjelaskan *Southeast Asian Minister of*

³⁵*Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO). 2017. "What is SEAMEO?". Diakses dari <http://www.seameo.org> pada 5 Juni 2017

³⁶The ASEAN Secretariat. 2015. "ASEAN Economic Community". Jakarta: *The ASEAN Secretariat Public Outreach and Civil Society Division*. Halaman 2-3

Education Organization (SEAMEO), dan sub bab kedua menjelaskan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

2.1 *Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO)

SEAMEO resmi digunakan sebagai acuan negara-negara di Asia Tenggara pada kerjasama dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan semenjak tahun 1965. Sampai saat ini, sudah 52 tahun organisasi ini resmi menunjukkan perannya dalam meningkatkan mutu pendidikan di Asia Tenggara dan masih tetap menjaga eksistensinya hingga saat ini. Sebagai salah satu organisasi pendidikan yang cukup berpengaruh di kawasan Asia Tenggara perjalanan SEAMEO untuk menunjukkan perannya dalam memajukan kualitas pendidikan di Asia Tenggara ternyata membutuhkan proses yang sangat panjang. Bermula sejak tahun 1965 dimana organisasi ini dibentuk, dan yang terakhir ialah tahun 2013 dimana Inggris memutuskan untuk bergabung sebagai negara anggota asosiasi SEAMEO yang kesembilan.³⁷ Berikut ialah *timeline* perjalanan SEAMEO sebagai organisasi pendidikan di Asia Tenggara:

1965 : pembentukan SEAMEO sebagai hasil pertemuan di Bangkok pada 30 November 1965, antara Menteri Pendidikan Laos, Malaysia, Singapura, Thailand dan Republik Vietnam Selatan, Ketua Komisi Nasional UNESCO untuk Filipina, dan Penasihat Khusus untuk Presiden Amerika Serikat.

1966 : pembentukan dua SEAMEO *centre* pertama, yaitu SEAMEO *centre* untuk Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Matematika (SEAMEO RECSAM) di Malaysia, dan SEAMEO *Regional Language Centre* (SEAMEO RELC) di Singapura.

1967 : pembentukan:

- a. SEAMEO Pusat Regional untuk Studi Pascasarjana dan Penelitian Pertanian (SEAMEO SEARCA) dan Empat Pusat SEAMEO *Regional Tropical Medicine* dan Jaringan Kesehatan Masyarakat

³⁷*Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO). 2017. "What is SEAMEO?". Diakses dari <http://www.seameo.org> pada 5 Juni 2017

(SEAMEO TROPMED), dengan unit koordinasi, Kantor Pusat TROPMED di Thailand

- b. SEAMEO Pusat Regional Mikrobiologi, Parasitologi dan Entomologi di Malaysia
- c. SEAMEO Pusat Regional untuk Gizi Masyarakat di Indonesia
- d. SEAMEO Pusat Regional untuk Kesehatan Masyarakat di Filipina
- e. SEAMEO Pusat Regional untuk Pengobatan Tropis di Thailand.

1968 : pembentukan SEAMEO *Regional Center for Tropical Biology* (SEAMEO BIOTROP) di Indonesia.

1970 : pembentukan Pusat Regional SEAMEO untuk Inovasi dan Teknologi Pendidikan (SEAMEO INNOTECH) di Vietnam.

1971 : Kamboja diterima sebagai anggota SEAMEO

1973 : ketentuan untuk keanggotaan Asosiasi dalam SEAMEO *Charter* didirikan, dan Perancis negara anggota Asosiasi SEAMEO pertama

1973 : Australia dan Selandai Baru bergabung menjadi negara anggota Asosiasi SEAMEO

1978 : SEAMEO Regional Project untuk Arkeologi dan Seni Rupa (SEAMEO SPAFA) didirikan di Thailand

1983 : Konferensi Dewan SEAMEO ke-18 di Penang, Malaysia menyetujui revisi Piagam SEAMEO untuk meliputi Keanggotaan Afiliasi

1984 : Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota SEAMEO

1988 : Kanada bergabung menjadi negara anggota Asosiasi SEAMEO

1990 : pembentukan SEAMEO *centre* untuk Pendidikan Kejuruan dan Teknik (SEAMEO VOCTECH) di Brunei Darussalam

1992 : Vietnam bergabung sebagai anggota SEAMEO

1993 : SEAMEO *Regional Centre for Higher Education* (SEAMEO RIHED) didirikan di Thailand, dan Belanda menjadi negara anggota SEAMEO keenam SEAMEO.

1996 : SEAMEO *Regional Training Center* (SEAMEO RETRAC) didirikan di Vietnam.

1997 : SEAMEO SEAMOLEC didirikan di Indonesia

1998 : Myanmar bergabung menjadi anggota SEAMEO

1999 : The International Council for Open and Distance Education (ICDE) bergabung dengan SEAMEO sebagai anggota afiliasi

2000 : SEAMEO *Regional Centre for History and Tradition* (SEAMEO CHAT) diresmikan di Myanmar

2005 : Norwegia menjadi negara anggota Asosiasi SEAMEO

2006 : Konferensi Dewan SEAMEO ke-41 mengakui aksesi Timor-Leste sebagai Negara Anggota SEAMEO ke-11

2007 : Spanyol bergabung menjadi negara anggota Asosiasi SEAMEO

2009 : pembentukan:

- a. SEAMEO *centre* untuk Peningkatan Mutu Pengajar dan Tenaga Kependidikan (QITEP) Bahasa didirikan di Indonesia
- b. SEAMEO *centre* untuk Peningkatan Mutu Pengajar dan Tenaga Kependidikan (QITEP) Matematika didirikan di Indonesia
- c. SEAMEO *centre* untuk Peningkatan Mutu Pengajar dan Tenaga Kependidikan (QITEP) dalam Ilmu Pengetahuan didirikan di Indonesia
- d. SEAMEO *Regional Center for Special Education* (SEAMEO SEN) didirikan di Malaysia

2010 : SEAMEO *centre* untuk Pangan dan Gizi (SEAMEO RECFON) didirikan di Indonesia, dan SEAMEO TROPMED Indonesia direstrukturisasi sebagai SEAMEO *Regional Centre for Food and Nutrition* (SEAMEO RECFON)

2011 : Norwegia menarik keanggotaannya sebagai negara anggota Asosiasi SEAMEO

2013 : Inggris bergabung sebagai negara anggota Asosiasi SEAMEO.³⁸

³⁸*Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO). 2017. *History SEAMEO*. Diakses dari http://www.seameo.org/SEAMEOWeb2/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=520 pada 5 Juni 2017

Saat ini, SEAMEO dipimpin oleh Menteri Pendidikan Thailand yang bernama Dr Teerakiat Jareonsettasin. Teerakiat Jareonsettasin membawahi sepuluh anggota diantaranya ialah Menteri Pendidikan Brunei Darrussalam yaitu Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Haji Suyoi bin Haji Osman, Menteri Pendidikan Kamboja yaitu Dr Hang Chuon Naron, Menteri Pendidikan Indonesia yaitu Prof Dr Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan Laos yaitu Madame Sengdeuane Lachanthaboun, Menteri Pendidikan Malaysia yaitu Dato' Seri Mahdzir Bin Khalid, Menteri Pendidikan Myanmar yaitu Dr Myo Thein Gyi, Menteri Pendidikan Filipina yaitu Dr Leonor Magtolis Briones, Menteri Pendidikan Singapura yaitu Mr NG Chee Meng, Menteri Pendidikan Timor Leste yaitu Mr Antonio Da Conceicao, dan Menteri Pendidikan Vietnam yaitu Prof Dr Phung Xuan Nha. Kantor Sekretariat SEAMEO berada di Bangkok, Thailand. Adapun fungsi dari Sekretariat SEAMEO ialah, (1). menegakkan Piagam SEAMEO, (2). menjalankan instruksi dan keputusan Dewan, (3). mengembangkan keanggotaan, (4). mengelola dana keuangan, (5). menyebarluaskan informasi dan melaksanakan hubungan masyarakat, (6). mengkoordinasikan kegiatan di antara Negara Anggota SEAMEO, SEAMEO Center, anggota asosiasi, dan organisasi lainnya, (7). mengatur proyek khusus, (8). mengembangkan proposal proyek atas nama Organisasi, (9). mengadakan pertemuan dan konferensi, terutama Konferensi Dewan SEAMEO, Rapat Direksi Pusat, dan Rapat Pejabat Tinggi (10). fokus pada masalah kebijakan, (11). berhubungan dengan Dewan dan Pusat SEAMEO, (12). mengkoordinasikan kegiatan dan memastikan kerjasama antara Negara Anggota SEAMEO, SEAMEO Center dan institusi lainnya, (13). menentukan kegiatan yang paling baik dilakukan oleh Pusat dan tinjau program dan proyek saat ini, (14). membangun kapasitasnya untuk melakukan evaluasi, (15). mengirimkan rekomendasi dari SEAMEO Center kepada *High Officials Meeting* untuk pengesahan dan ke Dewan SEAMEO untuk mendapatkan persetujuan.³⁹

³⁹*Southeast Asian Minister of Education Organization (SEAMEO). 2017. SEAMEO Secretariat. Diakses dari http://www.seameo.org/SEAMEOWeb2/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=545 pada 5 Juni 2017*

Sebagai organisasi kawasan yang murni mengurus segala hal yang berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, SEAMEO bebas dari intervensi bidang-bidang kepentingan lainnya (baik itu ekonomi, politik, keamanan, dan lain sebagainya). Hal ini menyebabkan SEAMEO dapat memfokuskan kinerjanya pada bidang yang menjadi kajiannya. Namun, perlu juga disadari bahwa tidak ada satu pun organisasi baik itu dalam cakupan regional maupun global yang dapat berdiri sendiri tanpa bidang-bidang lainnya. Kendati ruang lingkup SEAMEO hanya terbatas pada bidang pendidikan namun dalam perkembangannya organisasi ini juga membutuhkan bidang-bidang lainnya. Beberapakekuatan SEAMEO sebagai organisasi yang berfokus pada permasalahan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan di Asia Tenggara ialah, (1). tidak berorientasi pada politik, (2). SEAMEO memiliki pengelompokan keanggotaan negara terbesar yakni 11 negara anggota di kawasan Asia Tenggara yang menangani masalah pendidikan, (3). Fleksibilitas dan ketahanannya memungkinkan menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan politik dan sosio-ekonomi yang cepat berubah di Asia Tenggara, (4). program dan kegiatan profesional dan teknis yang sering dilakukan secara reguler bersifat khusus dan unik, (5). organisasi ini telah membangun infrastruktur yang kuat untuk sumber daya fisik dan peralatan yang ekstensif. Hampir setiap Center memiliki kampus, pelatihan, penelitian dan penyebaran informasi, fasilitas asrama agar dapat menjalankan fungsinya dengan sukses dan berkualitas, (6). sumber daya organisasi mencakup pengalaman, informasi, jaringan kontak dan keterkaitannya yang luas baik secara nasional maupun internasional, (7). kegiatannya difokuskan pada tema pembangunan sumber daya manusia yang sangat menarik, termasuk pembangunan berkelanjutan. Ini membantu membuat SEAMEO menarik bagi negara-negara yang ingin memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di tingkat akar rumput di Asia Tenggara, (8). kompetensi dan pengalaman anggotanya, dilengkapi dengan keahlian teknis yang disediakan oleh negara Anggota Asosiasi SEAMEO dan agen mitra, menyumbang kualitas dan dampak program dan kegiatannya, (9). karakteristik regional dari staf profesional Pusat juga berkontribusi terhadap

kekayaan pengalaman dan kompetensi setiap Pusat untuk menangani proyek-proyek yang dijalanannya.⁴⁰

Telah disebutkan bahwa SEAMEO memiliki visi dan misi yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut SEAMEO membentuk 21 SEAMEO *center* yang masing-masing tersebar di seluruh negara di kawasan Asia Tenggara. 21 SEAMEO *center* tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1 SEAMEO *center* di Masing-masing negara di Kawasan Asia Tenggara



Sumber: Southeast Asian Minister of Education Organization (SEAMEO). 2017. *SEAMEO Centre*. Diakses dari http://www.seameo.org/SEAMEOWeb2/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=98&Itemid=519 pada 5 Juni 2017

⁴⁰Southeast Asian Minister of Education Organization (SEAMEO). 2017. *SEAMEO Secretariat*. Diakses dari http://www.seameo.org/SEAMEOWeb2/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=545 pada 5 Juni 2017

Berdasarkan gambar pada halaman sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:



SEAMEO Regional Centre for Tropical Biology (BIOTROP)

Terletak di Bogor, Indonesia, kegiatan utama SEAMEO BIOTROP fokus pada hutan, hama, dan biologi air. Tujuan utamanya adalah membantu negara-negara Anggota SEAMEO dalam mengembangkan keahlian untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, menganalisa dan merekomendasikan solusi atau pendekatan alternatif terhadap masalah biologis kritis di kawasan ini, terutama yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan ekosistem tropis.



SEAMEO Regional Centre for Lifelong Learning (CELL)

SEAMEO CELL dibentuk pada tahun 2012 di Vietnam, SEAMEO CELL menghususkan diri dalam penelitian dan pelatihan pembelajaran seumur hidup sebagai dasar pengembangan kebijakan pendidikan. Pusat ini diharapkan menjadi titik fokus untuk memperkuat hubungan antara Asia dan Eropa dalam mempromosikan pembelajaran seumur hidup.



SEAMEO Regional Centre for History and Tradition (CHAT)

Bertempat di Myanmar, SEAMEO CHAT diresmikan pada bulan Desember 2000 hal ini kemudian menjadikannya SEAMEO *Center of Excellence* terbaru. Tugasnya adalah untuk mempromosikan kerja sama dalam studi sejarah dan tradisi di antara Negara Anggota SEAMEO melalui penelitian, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan jaringan.



SEAMEO Regional Centre for Educational Innovation and Technology (INNOTECH)

Bertempat di Filipina, SEAMEO INNOTECH memulai dan menyebarkan program pendidikan yang inovatif dan berorientasi teknologi yang membantu

Negara-negara Anggota SEAMEO mengidentifikasi dan memecahkan masalah pendidikan yang umum atau unik dan mengatasi kebutuhan yang diantisipasi.



SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel (QITEP) in Language(QITEP BAHASA)

SEAMEO QITEP BAHASA dibentuk oleh Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia, SEAMEO QITEP untuk bahasa menawarkan kursus dan program pelatihan untuk pendidik dan pengembangan guru SEAMEO QITEP. Bertempat di Jakarta, pusat ini mempromosikan program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan pendidikan di bidang Bahasa.



SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel(QITEP) in Mathematics(QITEP MATEMATIKA)

SEAMEO QITEP MATEMATIKA dibentuk oleh Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia, SEAMEO QITEP untuk Matematika menawarkan kursus dan program pelatihan untuk pendidik dan pengembangan guru. Berlokasi di Yogyakarta, pusat ini mempromosikan program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan pendidikan di bidang Matematika.



SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel (QITEP) in Science(QITEP ILMU PENGETAHUAN)

SEAMEO QITEP ILMU PENGETAHUAN dibentuk oleh Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia, *SEAMEO QITEP for Science* menawarkan kursus dan program pelatihan untuk pendidik dan pengembangan guru. Bertempat di Bandung, pusat ini mempromosikan program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan pendidikan di bidang Ilmu Pengetahuan.



SEAMEO Regional Centre for Food and Nutrition (RECFCO)

Berlokasi di Jakarta, Indonesia, SEAMEO RECFCO sebelumnya dikenal dengan SEAMEO TROPMED *Regional Center for Community Nutrition* (SEAMEO-TROPMED RCCN). Tujuannya adalah sebagai pusat makanan dan gizi bertujuan membantu negara-negara anggota.



SEAMEO Regional Centre for Education in Science and Mathematics (RECSAM)

SEAMEO RECSAM dibentuk di negara bagian Penang, Malaysia, SEAMEO RECSAM dirancang untuk memenuhi kebutuhan Negara-negara Anggota SEAMEO dalam mengembangkan program pendidikan sains, matematika dan teknologi.



SEAMEO Regional Language Centre (RELC)

Bertempat di Singapura, SEAMEO RELC membantu negara anggota SEAMEO dengan keahlian, fasilitas pelatihan dan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan spesialis bahasa dan pendidik. Program berfokus pada pengetahuan dan disiplin pedagogik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa.



SEAMEO Regional Training Centre (RETRAC)

SEAMEO RETRAC membantu Negara Anggota SEAMEO khususnya Kamboja, Laos dan Vietnam untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah umum dalam pengembangan sumber daya manusia. Bidang spesialisasi adalah pengelola pendidikan.



SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development (RIHED)

SEAMEO RIHED memainkan peran penting dalam membangun kemampuan SEAMEO Negara-negara Anggota di bidang pendidikan tinggi. Ini merespons

kebutuhan akan kebijakan dan perencanaan, administrasi dan pengelolaan pendidikan tinggi



SEAMEO Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC)

SEAMEO SEAMOLEC membantu SEAMEO Member Countries dalam mengidentifikasi masalah pendidikan dan menemukan solusi alternatif untuk pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan melalui diseminasi dan penggunaan pembelajaran terbuka dan jarak jauh yang efektif.



SEAMEO Regional Centre for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA)

SEAMEO SEARCA, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Filipina, melayani kebutuhan pertanian dan pedesaan di kawasan ini melalui program pengembangan sumber daya manusia dan kegiatan penelitian dan penyuluhan.



SEAMEO Regional Centre for Special Education (SEN)

Terletak di Malaysia, SEAMEO SEN mengkhususkan diri pada pendidikan untuk mendukung kebutuhan anak-anak dengan berbagai kecacatan dan pendidikan untuk kebutuhan anak-anak berbakat dan berbakat.



SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts (SPAFA)

SEAMEO SPAFA diselenggarakan oleh Pemerintah Thailand, dan untuk memupuk kesadaran dan apresiasi terhadap warisan budaya; Mempromosikan dan memperkaya kegiatan arkeologi dan budaya di wilayah ini; Dan furthers kompetensi profesional di bidang arkeologi dan seni rupa untuk memajukan saling pengetahuan dan pemahaman di antara Negara Anggota SEAMEO



SEAMEO Tropical Medicine and Public Health Network (TROPMED Network)

SEAMEO TROPMED Network adalah jaringan kerjasama regional yang didirikan pada tahun 1966 untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian kedokteran tropis dan kesehatan masyarakat di bawah Menteri Pendidikan Asia Tenggara.

Jaringan berfungsi sebagai *vocal point* dalam pendidikan tinggi dan penelitian kedokteran tropis dan kesehatan masyarakat. SEAMEO TROPMED Network memiliki tiga pusat sub-regional di Malaysia, Filipina dan Thailand. Kantor pusatnya terletak di Bangkok. Peran keseluruhan Jaringan adalah untuk mempromosikan kesehatan dan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit tropis dan masalah kesehatan masyarakat.



SEAMEO TROPMED Regional Centre for Microbiology, Parasitology and Entomology (TROPMED Malaysia)

SEAMEO TROPMED Malaysia, yang berada di Institute for Medical Research di Kuala Lumpur, melakukan penelitian untuk pencegahan dan pengendalian penyakit dan memberikan layanan pelatihan, diagnostik, konsultasi dan konsultasi khusus. Ini mempromosikan manajemen kesehatan sebagai tanggung jawab kolektif pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, masyarakat dan individu.



SEAMEO TROPMED Regional Centre for Public Health, Hospital Administration, Environmental and Occupational Health (TROPMED Philippines)

SEAMEO TROPMED Philippines, yang bermarkas di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Filipina di Manila, melakukan penelitian dan pelatihan di bidang kesehatan masyarakat, kedokteran pedesaan, administrasi rumah sakit, kesehatan lingkungan dan pekerjaan, kebijakan dan manajemen kesehatan.



SEAMEO TROPMED Regional Centre for Tropical Medicine (TROPMED Thailand)

SEAMEO TROPMED Thailand, yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Tropis, Universitas Mahidol, Bangkok, menawarkan pelatihan tentang penyakit tropis, parasitologi, komunitas dan pengobatan pencegahan endemik. Ini juga melakukan penelitian tentang langkah-langkah pengendalian alternatif penyakit dan promosi gaya hidup sehat, termasuk uji coba senyawa kemoterapi baru dan vaksin baru. Ini memberikan perawatan klinis untuk pasien yang menderita penyakit tropis.



SEAMEO Regional Centre for Vocational and Technical Education and Training (VOCTECH)

SEAMEO VOCTECH dibentuk untuk memperbaiki pengelolaan pendidikan dan pelatihan kejuruan dan teknis (VTET) di Negara-negara Anggota SEAMEO. Center berusaha untuk mengembangkan dan menyampaikan program yang relevan di VTET untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan regional di pasar sosio-ekonomi, industri, bisnis dan perburuhan.⁴¹

2.2 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

MEA secara resmi diberlakukan pada tahun 2015. Keinginan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk mengintegrasikan perekonomian diwujudkan dengan adanya MEA. Salah satu ciri utama dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ialah perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sebuah pasar global yang terbuka dimana barang dan jasa bisa bergerak bebas melewati batas-batas negara.⁴² Dapat dikatakan pula bahwa perdagangan bebas merupakan praktik perdagangan yang mampu meningkatkan persaingan antar negara sehingga meningkatkan efisiensi, baik sumber daya alam, manusia, dan modal. Penganut teori ini menyakini bahwa suatu negara akan lebih diuntungkan apabila mereka membuka perekonomian di negaranya, dibandingkan dengan menutup perekonomian. Adanya spesialisasi dalam hal produksi menjadi keuntungan yang akan diterima oleh negara. Dengan hanya memproduksi barang atau jasa yang menjadi unggulan suatu negara maka negara tersebut akan mendapat keuntungan.

Dalam perdagangan yang dilakukan antar negara dikenal istilah bea masuk impor yang dikenakan kepada barang atau jasa impor yang memasuki suatu negara, disamping itu ada pula pajak ekspor yang dikenakan atas penjualan barang ke luar negeri. Kedua hal tersebut merupakan hambatan-hambatan tarif dalam perdagangan

⁴¹*Southeast Asian Minister of Education Organization (SEAMEO). 2017. SEAMEO Centre.*

Diakses dari

http://www.seameo.org/SEAMEOWeb2/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=98&Itemid=519 pada 5 Juni 2017

⁴²*Ibid.* Halaman 74

internasional. Sebagaimana diketahui bahwa selain hambatan tarif, ada pula hambatan non-tarif, seperti penetapan kouta barang atau jasa yang diimpor, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu barang atau jasa boleh diimpor, dan subsidi yang harus diberikan kepada produsen dalam negeri. Hambatan semacam ini, baik tarif maupun non-tarif intinya bertujuan melindungi produsen dalam negeri agar tidak tergerus oleh produsen asing. Menurut pendukung teori perdagangan bebas, hambatan-hambatan baik tarif maupun non-tarif akan menghambat perdagangan antar negara sehingga upaya untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi negara akan terhambat. Solusi yang ditawarkan oleh teori ini adalah dengan meminimalkan atau bahkan menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Caranya adalah dengan membentuk perjanjian perdagangan bebas, baik yang dibentuk oleh negara maupun oleh organisasi internasional yang mendorong perdagangan bebas antar negara anggotanya.

Bentuk-bentuk kerjasama MEA ialah:

1. Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas.
2. Pengakuan kualifikasi profesional
3. Konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan
4. Langkah-langkah pembiayaan perdagangan (investasi)
5. Meningkatkan infrastruktur (pembangunan)
6. Pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN (teknologi)
7. Mengintegrasikan industry di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daerah
8. Meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN.⁴³

⁴³The ASEAN Secretariat. 2015. "ASEAN Economic Community". Jakarta: *The ASEAN Secretariat Public Outreach and Civil Society Division*. Halaman 5

BAB. 3 PENDIDIKAN DI ASIA TENGGARA

Pendidikan merupakan salah satu cara paling dasar untuk menciptakan manusia yang beradab dan berkualitas. Melalui pendidikan akan didapat individu-individu generasi penerus yang lebih unggul dan terampil dalam segala bidang. Definisi pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, atau perbuatan mendidik.⁴⁴ Sedangkan menurut, Prof. Dr. John Dewey pendidikan merupakan suatu proses pengalaman, karena kehidupan merupakan pertumbuhan, maka pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia.⁴⁵ Jadi dapat pula penulis simpulkan bahwa pendidikan merupakan proses penting dalam kehidupan manusia, dimana dalam proses tersebut manusia akan diperkenalkan pada segala hal dalam berbagai bidang guna kehidupan manusia, mulai dari pendidikan materi, pendidikan moral, dan yang sangat penting ialah pendidikan agama. Semua unsur penting dalam kehidupan manusia dapat diberikan melalui proses pendidikan. Maka tidak mengherankan apabila pendidikan disebut sebagai suatu kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia.

Lebih lanjut lagi, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia karena dapat berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan ketidaksejahteraan. Contoh sederhananya ialah, pengetahuan yang didapat melalui pendidikan yang tinggi akan menjadikan seorang ibu lebih terampil dalam mempromosikan hidup yang sehat sehingga resiko angka kematian bayi di bawah umur lima tahun dapat diminimalisir. Selain itu, ibu yang lebih terampil dan terdidik juga akan mengenalkan pendidikan pada anaknya sejak usia dini sehingga anak-anak akan lebih siap untuk bersekolah dan lebih mudah untuk menerima pelajaran di sekolah. Setelah melewati masa anak-anak, seorang individu muda yang terdidik akan memiliki pengetahuan sehingga dapat menghindari segala

⁴⁴ KBBIOnline. 2017. "Pengertian Kata Didik". Diakses dari <http://kbbi.web.id/didik> pada 28 April 2017

⁴⁵ Tita Rostitawati. 2014. "Konsep Pendidikan John Dewey". *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 02 No. 2. Gorontalo: IAIN Sultan Amai. Halaman 11

macam tindakan berbahaya seperti narkoba, *free sex*, dan tindakan kriminal. Generasi muda yang terdidik merupakan aset penting bagi suatu negara.⁴⁶ Melalui generasi tersebut, masa depan negara akan lebih dapat terjamin lebih baik dan makmur.

Asia Tenggara merupakan rumah bagi sekitar 625 juta jiwa penduduk.⁴⁷ Jumlah tersebut membuat kawasan ini menempati urutan ketiga sebagai kawasan terpadat setelah Asia Selatan dan Asia Timur di benua Asia. Asia Tenggara mencerminkan suatu wilayah yang beragam meskipun memiliki berbagai kesamaan baik dari segi budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini ditunjukkan dengan adanya *gap* yang cukup nyata dan jelas terlihat antara negara maju dan negara berkembang. Singapura merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang tergolong sebagai negara maju di dunia, berdasarkan data *World Bank* pendapatan perkapita Singapura ialah sebesar \$292,7 milyar sampai pada kuartal⁴⁸ terakhir tahun 2015. Jumlah tersebut sekaligus menjadikan Singapura masuk ke dalam 20 besar sebagai negara dengan pendapatan perkapita tertinggi di dunia.⁴⁹ Selain Singapura, kawasan Asia Tenggara juga mencerminkan sebagai kawasan negara berkembang dengan peringkat terendah yaitu Myanmar. Myanmar merupakan salah satu dari sembilan negara berkembang lainnya di Asia Tenggara. Menurut data *World Bank* pendapatan perkapita Myanmar ialah sebesar \$62,60 sampai pada kuartal terakhir pada tahun 2015.⁵⁰ Jumlah ini menjadikan Myanmar menempati urutan ke-150 dari 187 negara di dunia.⁵¹ Selain pendapatan perkapita, keberagaman pertumbuhan negara di Asia Tenggara juga ditunjukkan dengan

⁴⁶ UNICEF Indonesia. 2012. "Pendidikan dan Perkembangan Anak Usia Dini". Jakarta: UNICEF Indonesia. Halaman 1

⁴⁷ *World Economic Forum* (WEF). 2016. *Human Capital Outlook Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*. Kuala Lumpur: *World Economic Forum*. Halaman 3

⁴⁸ Kuartal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suku tahun (waktu seperempat tahun, yaitu tiga bulan). *KBBIOnline*. 2017. "Pengertian Kuartal". Diakses dari <http://kbbi.web.id/kuartal> pada 28 April 2017

⁴⁹ *World Bank Official Account*. 2017. Singapore. Diakses dari <http://www.worldbank.org/en/country/singapore> pada 28 April 2017

⁵⁰ *World Bank Official Account*. 2017. Myanmar. Diakses dari <http://www.worldbank.org/en/country/myanmar> pada 28 April 2017

⁵¹ Knoema. 2017. *World GDP Per Capita Ranking 2015*. Diakses dari <https://knoema.com/sijweyg/world-gdp-per-capita-ranking-2016-data-and-charts-forecast> pada 28 April 2017

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)⁵² yang menunjukkan *gap* cukup jelas. Secara global, Singapura menempati urutan ke-24 dan Myanmar menempati urutan ke-112 berdasarkan data *World Economy Forum* pada tahun 2016.

Melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka akan dapat diketahui bagaimana pertumbuhan suatu negara. Hal ini karena salah satu unsur paling penting dalam sebuah negara yang sejahtera ialah adanya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Terdapat beberapa faktor untuk menentukan IPM diantaranya ialah, usia, pendidikan, kesehatan, dan standar kehidupan manusia. Telah disebutkan oleh penulis pada awal bab ini bahwa pendidikan merupakan unsur penting dalam perkembangan kehidupan manusia. Pendidikan juga merupakan salah satu fokus yang menjadi perhatian di kawasan Asia Tenggara,. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya sebuah organisasi dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya yang dikenal dengan SEAMEO pada tahun 1965.

Data *World Economic Forum* (WEF) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa sekitar 85% anak usia sekolah dasar di Asia Tenggara sudah berpartisipasi penuh dalam kegiatan belajar di sekolah.⁵³ Angka ini menunjukkan bahwa sejak dibentuknya komunitas ASEAN pada tahun 1967, ASEAN telah berkomitmen penuh untuk meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang, dan salah satunya ialah bidang pendidikan. Upaya ini semakin diperkuat dengan adanya sebuah organisasi kawasan di Asia Tenggara yang khusus menangani bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya yaitu SEAMEO. Kendati SEAMEO telah dibentuk sebelum ASEAN terbentuk yaitu pada tahun 1965, namun kemunculan SEAMEO justru menjadi latar belakang pembentukan ASEAN.⁵⁴

Jauh sebelum kemunculan ASEAN menjadi satu-satunya organisasi tertinggi yang mencakup kerjasama dalam berbagai bidang, Asia Tenggara telah melakukan upaya-upaya untuk mengintegrasikan kawasanmya. Upaya tersebut ialah

⁵² Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah ukuran rata-rata mengenai beberapa elemen penting dalam kehidupan manusia, yaitu usia, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan manusia. UNDP. 2016. *Human Development Index (HDI)*. Diakses dari <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi> pada 28 April 2017

⁵³ *World Economic Forum* (WEF). Op.Cit., halaman 2

⁵⁴ *Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO). 2017. "What is SEAMEO?". Diakses dari <http://www.seameo.org> pada 28 April 2017

membentuk berbagai kerjasama regional yaitu, *Association of Southeast Asia* (ASA), Malaya, Philipina, Indonesia (MAPHILINDO), *SouthEast Asian Ministers of Education Organization* (SEAMEO), *SouthEast Asia Treaty Organization* (SEATO) dan *Asia and Pasific Council* (ASPAC). Kemunculan ASEAN juga turut mempengaruhi perkembangan kerjasama dalam bidang pendidikan di Asia Tenggara meskipun sebenarnya SEAMEO sebagai organisasi independen yang berada di luar kerangka organisasi ASEAN telah menunjukkan kinerjanya sebagai organisasi yang khusus menangani pendidikan di Asia Tenggara.⁵⁵

Lebih lanjut mengenai data jumlah anak yang berpartisipasi dalam dunia pendidikan, WEF mencatat pada tahun 2016 Singapura menjadi negara urutan pertama di Asia Tenggara dengan jumlah partisipasi anak usia 5 sampai dengan 9 tahun (usia sekolah dasar) untuk bersekolah yang paling tinggi, yaitu sebanyak 99%, Vietnam dan Kamboja sebanyak 98%, Malaysia dan Laos sebanyak 97%, Thailand sebanyak 96%, Indonesia sebanyak 95%, Philipina sebanyak 89%, dan Myanmar sebanyak 80%. Sedangkan untuk jumlah anak yang berpartisipasi jangka panjang (sekolah dasar, menengah, dan sekolah lanjutan), Philipina menempati urutan pertama sebagai negara dengan partisipasi anak untuk bersekolah tertinggi, yaitu sebanyak 97%, Vietnam sebanyak 94%, Thailand sebanyak 91%, Malaysia sebanyak 90%, Indonesia sebanyak 89%, Singapura sebanyak 85%, Myanmar sebanyak 80%, Kamboja sebanyak 74%, dan Laos sebanyak 64%.⁵⁶ Tingginya jumlah anak yang berpartisipasi untuk sekolah di Singapura disebabkan karena negara ini masuk kedalam sepuluh besar sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia.

Berdasarkan data *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD)⁵⁷, Singapura menempati urutan ke-6 sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia tahun 2016. Penjelasan-penjelasan tersebut

⁵⁵Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu). 2011. "Ayo Kita Kenali ASEAN". Jakarta Kementerian Luar Negeri. Halaman 5-6

⁵⁶*World Economic Forum* (WEF). Op.Cit., halaman 5

⁵⁷Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) adalah sebuah organisasi untuk kemajuan dan promosi kerjasama ekonomi yang beranggotakan 35 negara, dimana negara tersebut tidak hanya negara maju tetapi juga negara berkembang. OECD Official Account. 2017. *About OECD*. Diakses dari <http://www.oecd.org/about/> pada 28 April 2017

menjadi acuan penulis untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pendidikan di Asia Tenggara. Pada bab ini, penulis membagi pembahasan kedalam sebelas sub bab, dimana masing-masing sub bab menjelaskan pendidikan masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara tersebut. Alasan penulis untuk menguraikan secara detail mengenai pendidikan yang ada di kawasan Asia Tenggara ialah untuk memberikan gambaran secara rinci dan jelas sehingga memudahkan penulis dalam menganalisa permasalahan dalam karya ilmiah ini.

2.1 Pendidikan di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki jumlah populasi penduduk paling tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 258 juta jiwa, estimasi juni 2015.⁵⁸ Hal ini berarti sekitar 29% penduduk di Asia Tenggara ada di Indonesia. Jumlah penduduk yang tinggi membuat pemerintah Indonesia dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih untuk kesejahteraan masyarakatnya. Perhatian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, dimulai dari pemberian fasilitas yang memadai untuk semua kebutuhan masyarakat seperti kesehatan, ekonomi, akses terhadap agama, dan yang tidak kalah penting juga ialah pendidikan. Karena melalui pendidikan, maka generasi muda penerus bangsa akan lebih berkualitas sehingga masa depan bangsa juga lebih terjamin.

Indonesia adalah salah satu negara yang padat penduduknya di dunia dengan 258 juta orang dan sebanyak 30% dibawah usia 15 tahun. Pertumbuhan penduduk telah menurun dengan tingkat pertumbuhan 1,1% untuk tahun 2002 sampai dengan 2015.⁵⁹ Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia ialah, (1). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (3). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Indonesia. 2017. "Kependudukan". Diakses dari <https://www.bps.go.id> pada 28 April 2017

⁵⁹ Unicef Indonesia. 2015. "Laporan Tahunan Unicef Indonesia Tahun 2015". Jakarta: Unicef Indonesia. Halaman 14

tentang Guru dan Dosen, (4). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, (5). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (6). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, (7). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, (8). Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.⁶⁰

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 sampai dengan 2019 telah disusun tujuh point penting mengenai paradigma pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Sebagian point paradigma tersebut bersifat universal, dikenal dan dipakai berbagai bangsa. Sebagian lagi lebih bersifat nasional, sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia. Rincian paradigma itu ialah:

1. Pendidikan untuk Semua

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhannya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia adalah amanat konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis.

2. Pendidikan Sepanjang Hayat

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan.

⁶⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Kemendikbud). 2015. "Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia 2015-2019". Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Halaman 4

3. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat.

4. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik.

5. Pendidikan Membentuk Karakter

Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup.

6. Sekolah yang Menyenangkan

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa.

7. Pendidikan Membangun Kebudayaan

Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.⁶¹

⁶¹Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Kemendikbud). Op.Cit., halaman 5-6

Berdasarkan ketujuh paradigma tersebut, poin pertama dan kedua merupakan paradigma universal yang dipakai oleh banyak negara. Pendidikan untuk semua merupakan dasar bagi kesetaraan untuk mendapatkan hak belajar bagi semua anak di dunia. Mereka setara untuk menerima materi atau pelajaran apapun tanpa mengenal usia, suku, ras, bangsa, ataupun agama. Pendidikan sepanjang hayat menjelaskan bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sampai kapanpun, tidak mengenal usia dan tempat. Sedangkan point ketiga sampai dengan point ketujuh merupakan poin yang disesuaikan dengan kondisi internal bangsa Indonesia, baik itu dari segi ekonomi, sifat manusia, dan sosial budaya.

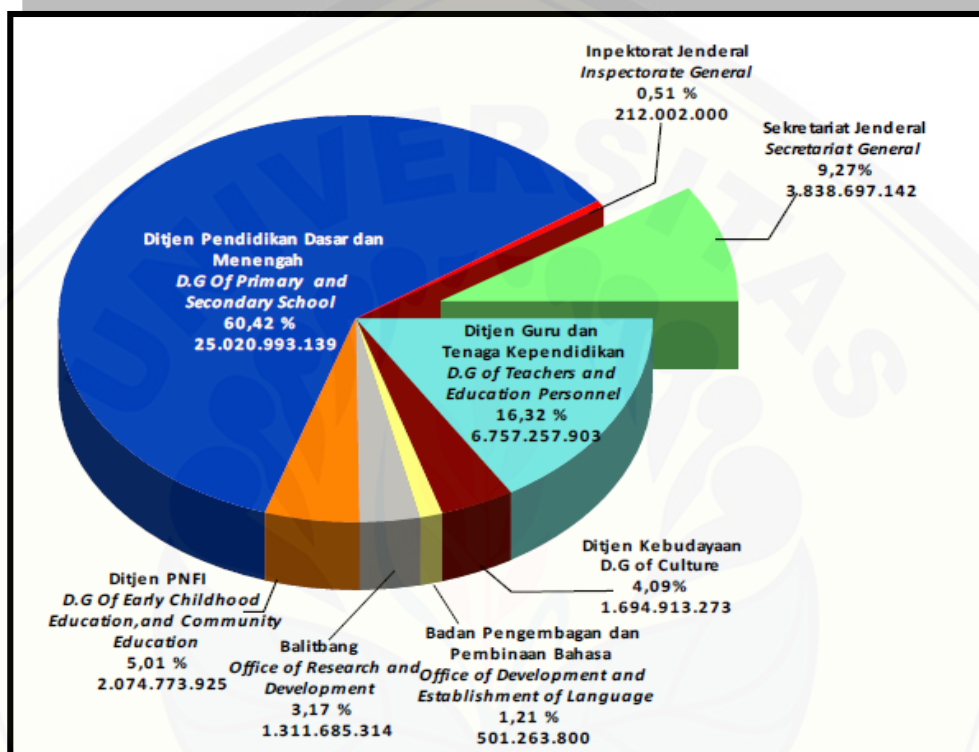
Menurut laporan tahunan SEAMEO pada tahun 2016, sebanyak 30% persen dari total jumlah penduduk di Indonesia merupakan anak-anak. Hal ini berarti, total jumlah anak di Indonesia ialah sebanyak 77,7 juta. Dari jumlah tersebut, anak yang berusia 7 sampai dengan 12 tahun ialah sebanyak 27,3 juta anak, anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun ialah sebanyak 13,3 juta anak, dan anak yang berusia 16 sampai dengan 18 tahun ialah sebanyak 13,2 juta anak. Wilayah Indonesia terbagi atas 34 propinsi dengan 514 kabupaten/kota.⁶² Luas wilayah dan banyaknya jumlah penduduk yang dimiliki oleh Indonesia membuat pemerintah khususnya kementerian pendidikan mengupayakan cara-cara terbaik untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Salah satunya ialah dalam hal pendidikan, pemerintah harus menjamin bahwa anak-anak usia sekolah di Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Hal ini karena kualitas pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Semakin bagus dan tinggi kualitas pendidikan, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di suatu negara seperti, jumlah anggaran dari pemerintah untuk pendidikan, jumlah guru dan tenaga pengajar yang tersedia, dan sarana dan prasarana sekolah.

Berdasarkan data Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) anggaran dana untuk pendidikan di Indonesia ialah sebanyak Rp. 41,4 milyar. Untuk

⁶²SEAMEO. 2015. Op.Cit., halaman 15

pemahaman lebih lanjut, berikut ialah data jumlah anggaran dana pendidikan Indonesia yang berasal dari dalam negeri tahun 2015:

Gambar 3.1 Jumlah Anggaran Dana Pendidikan Indonesia yang Beasal dari Dalam Negeri Tahun 2015



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 2016. *Indonesia Educational Statistics in Brief 2015/2016*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Halaman 139

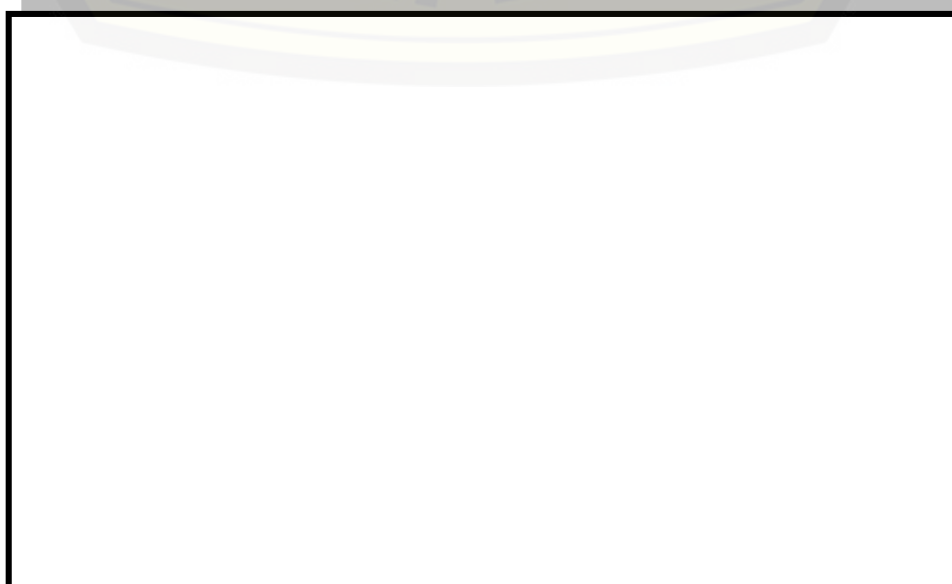
Dana untuk anggaran Pendidikan di Indonesia seperti yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, didapat melalui dua sumber, yakni melalui dana dalam negeri dan melalui pinjaman luar negeri (*loan*). Dana yang didapat melalui dana dalam negeri ialah sebanyak Rp. 40,9 milyar, sedangkan dana yang didapat melalui pinjaman luar negeri ialah sebanyak Rp. 491 juta.⁶³ Dana yang didapat dari dalam negeri tersebut berasal dai beberapa lembaga yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia.

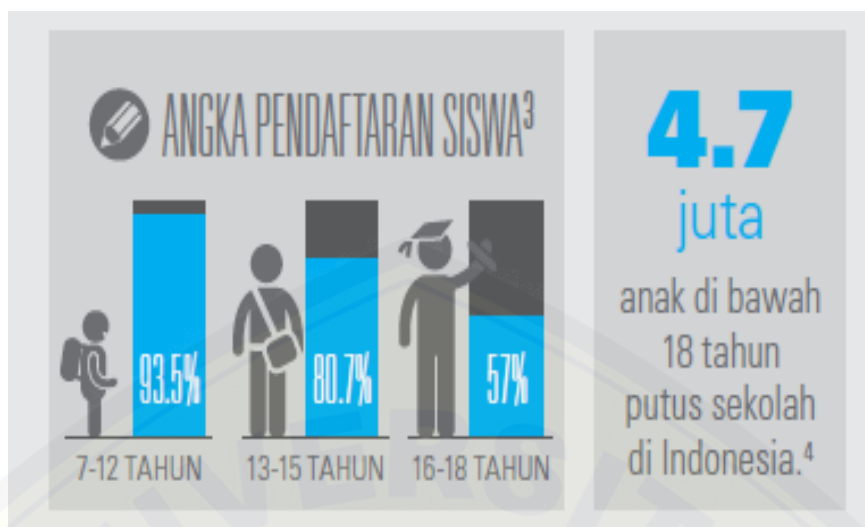
⁶³Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 2016. *Indonesia Educational Statistics in Brief 2015/2016*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Halaman 2

Bedasarkan gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa sumbangan terbesar untuk dana pendidikan di Indonesia berasal dari Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu sebanyak Rp. 25 milyar. Sumbangan kedua berasal dari Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu sebanyak Rp. 6,7 milyar. Sumbangan ketiga berasal dari Sekretariat Jenderal, yaitu sebanyak Rp. 3,8 milyar. Sumbangan keempat berasal dari Ditjen PNFI, yaitu sebanyak Rp. 2 milyar. Sumbangan kelima berasal dari Ditjen Kebudayaan, yaitu sebanyak Rp. 1,6 milyar. Selanjutnya, sumbangan yang berasal dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu sebanyak Rp. 501 juta. Terakhir ialah sumbangan yang berasal dari Inspektorat Jenderal, yaitu sebanyak Rp. 212 juta. Kendati telah menerima sumbangan dari berbagai elemen untuk anggaran pendidikan dalam negeri, Indonesia tetap membutuhkan bantuan pinjaman dari luar negeri untuk memenuhi anggaran pendidikan.

Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pendidikan di Indonesia berikut ialah data Angka pendaftaran siswa di Indonesia tahun 2015.

Gambar 3.2 Jumlah Pendaftaran Siswa di Indonesia Tahun 2015





Sumber: Unicef Indonesia. 2015. "Laporan Tahunan Unicef Indonesia Tahun 2015". Jakarta: Unicef Indonesia. Halaman 15

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah pendaftaran siswa di Indonesia pada tahun 2015 yang paling tinggi ialah pada tingkat sekolah dasar yakni sebesar 93,5%. Pada tahapan selanjutnya yaitu sekolah menengah pertama yaitu sebanyak 80,7%. Penurunan kembali terjadi pada tingkat sekolah menengah atas, dimana hanya sekitar 57% siswa yang mendaftar. Tingginya tingkat partisipasi anak Indonesia untuk bersekolah pada tingkat sekolah dasar menandakan bahwa para orang tua di Indonesia telah memiliki kesadaran yang cukup baik akan pentingnya pendidikan bagi tumbuh kembang anak. Kesadaran orang tua merupakan hal yang sangat penting karena hal ini dapat mempengaruhi cara anak dalam menentukan pendidikan di masa mudanya. Selain itu, orang tua merupakan satu-satunya orang yang dapat membimbing dan mengarahkan anak dalam memilih dan menentukan sekolah yang baik. Kendati jumlah partisipasi anak yang mendaftarkan diri pada tingkat sekolah dasar cukup tinggi, namun persentase jumlah anak yang berpartisipasi pada tingkatan sekolah selanjutnya (SMP dan SMA) mengalami penurunan, dan puncaknya pada tingkatan sekolah menengah atas hanya terdapat 57% anak yang berpartisipasi. Hal ini berarti, lebih dari setengah jumlah anak yang berpartisipasi untuk bersekolah di SD tidak meneruskan pendidikan hingga tingkat SMA. Salah satu penyebab yang dapat penulis analisis dari permasalahan ini ialah faktor ekonomi. Kemiskinan dan ketidaksejahteraan

yang masih terjadi di hampir sebagian besar wilayah di Indonesia memaksa anak-anak usia SMP dan SMA untuk bekerja dan memilih tidak meneruskan bersekolah. Ekonomi dan pendidikan memang dua hal yang saling tumpang tindih, erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan antar satu dan lainnya. Pendidikan yang rendah dapat menyebabkan kemiskinan, begitu pula sebaliknya, kemiskinan dapat menyebabkan masyarakat menjadi terbelakang dan berkualitas kurang baik.

Indonesia memiliki sistem pendidikan jalur sekolah formal yakni enam tahun di Sekolah Dasar (SD), tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP), tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan empat tahun di Perguruan Tinggi. Selama sembilan tahun di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama merupakan pendidikan wajib belajar. Sebelum tahun 1994, Indonesia belum menerapkan adanya sistem wajib belajar, baru semenjak tahun tersebut Indonesia menerapkan sistem wajib belajar yakni sembilan tahun.⁶⁴ Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar terdiri atas Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik,

⁶⁴ UNESCO Bangkok. 2014. *Education Systems in ASEAN+6 Countries: A Comparative Analysis of Selected Educational Issues*. Bangkok: UNESCO office. Halaman 12

profesi, dan/atau vokasi. Untuk memperjelas pemahaman mengenai pendidikan di Indonesia berikut ialah data jumlah lembaga pendidikan yang ada di Indonesia:

Tabel 3.1 Jumlah Lembaga Pendidikan Menurut Jenis Sekolah di Indonesia Tahun 2015-2016

| No. Jenis Sekolah / Type of School | Status Sekolah/Status of School | | |
|---|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| | Negeri Public | Swasta Private | Jumlah Total |
| A. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan / Ministry of Education and Culture | | | |
| 1 Taman Kanak-kanak (TK) / Kindergarten (KG) | <u>3.186</u> | <u>82.313</u> | <u>85.499</u> |
| 2 Sekolah Luar Biasa (SLB) / Special School (SS) | <u>521</u> | <u>1.441</u> | <u>1.962</u> |
| 3 Sekolah Dasar (SD) / Primary School (PS) | <u>132.381</u> | <u>15.155</u> | <u>147.536</u> |
| 4 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Junior Secondary School (JSS) | <u>22.475</u> | <u>14.548</u> | <u>37.023</u> |
| 5 Sekolah Menengah (SM) Senior Secondary School (SSS) | <u>9.675</u> | <u>15.673</u> | <u>25.348</u> |
| a. Sekolah Menengah Atas (SMA) General Senior Secondary School (GSSS) | 6.355 | 6.334 | 12.689 |
| b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Vocational Senior Secondary School (VSSS) | 3.320 | 9.339 | 12.659 |
| B. Kementerian Agama / Ministry of Religious Affair | | | |
| 1 Bustanul Athfal (BA)/Raudatul Athfal (RA) Islamic Kindergarten (IKG) | <u>0</u> | <u>27.999</u> | <u>27.999</u> |
| 2 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Islamic Primary School (IPS) | <u>1.686</u> | <u>22.874</u> | <u>24.560</u> |
| 3 Madrasah Tsanawiyah (MTs) Islamic Junior Secondary School (IJSS) | <u>1.437</u> | <u>15.497</u> | <u>16.934</u> |
| 4 Madrasah Aliyah (MA) Islamic Senior Secondary School (ISSS) | <u>763</u> | <u>7.080</u> | <u>7.843</u> |

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 2016. *Indonesia Educational Statistics in Brief 2015/2016*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Halaman 16

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah sekolah formal yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Kemendikbud) lebih banyak apabila dibandingkan dengan jumlah sekolah formal yang dibentuk oleh Kementerian agama. Mengingat Indonesia merupakan negara dimana mayoritas penduduk beragama Islam maka tidak mengherankan apabila pemerintah memiliki perhatian khusus bagi perkembangan sekolah yang berbasis

agama Islam di Indonesia mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Pada sekolah formal yang dibentuk oleh Kemendikbud, Jumlah TK di Indonesia ialah sebanyak 85.499 sekolah, dimana jumlah sekolah swasta (3,186 sekolah) lebih banyak dari sekolah negeri (82,313). Jumlah SD di Indonesia ialah sebanyak 147,536 sekolah, dimana sekolah negeri (132,381) lebih banyak dari sekolah swasta (15,155). Jumlah SMP di Indonesia ialah sebanyak 37,023 sekolah, dimana sekolah negeri (22,475) lebih banyak dari sekolah swasta (14,548). Jumlah SMA di Indonesia ialah sebanyak 12,689 sekolah, dimana sekolah negeri (6,355) lebih banyak dari sekolah swasta (6,334). Jumlah SMK di Indonesia ialah sebanyak 12,659 sekolah, dimana sekolah swasta (9,339) lebih banyak dari sekolah negeri (3,320). Sedangkang untuk RA hanya ada sekolah swasta dimana jumlahnya ialah sebanyak 27,999 sekolah. Jumlah MI ialah sebanyak 24,560 sekolah, dimana sekolah swasta (22,847) lebih banyak dari sekolah negeri (1,686). Jumlah MTs ialah sebanyak 16,934 sekolah, dimana sekolah swasta (15,497) lebih banyak dari sekolah negeri (1,437). Jumlah MA ialah sebanyak 7,843 sekolah, dimana sekolah swasta (7,080) lebih banyak dari sekolah negeri (763).

3.2 Pendidikan di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang juga tergolong sebagai negara rumpun Melayu yang memiliki wilayah negara yang terpisah menjadi dua bagian, yakni bagian utama yang menyatu dengan daratan utama Asia dan bagian kedua ialah Sabah dan Sarawak yang menyatu dengan Pulau Kalimantan. Negara ini juga memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi menengah ke atas meskipun tergolong sebagai negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Jumlah GDP Malaysia terus mengalami pertumbuhan antara lima sampai dengan tujuh persen selama periode tahun 2000 sampai dengan 2013. Menurut data *Departement of Statistic Malaysia*, jumlah pertumbuhan GDP Malaysia mencapai 5,6% pada kuartal pertama tahun 2017.⁶⁵ Menurut data Index Mundi, Malaysia

⁶⁵ Departement of Statistics Malaysia (DOSM). 2017. *National Accounts*. Diakses dari https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/ctwoByCat&parent_id=99&menu_id=TE5CRUZCblh4ZTZMODZlbnk2aWRRQT09 pada 28 April 2017

memiliki jumlah penduduk sebanyak 31,7 juta jiwa berdasarkan estimasi pada kuartal terakhir tahun 2016.⁶⁶ Hal ini berarti, negara ini memiliki jumlah penduduk sekitar 1/8 dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. telah dijelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan dimana negaranya merupakan negara berkembang, dan Malaysia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di kawasan tersebut.

Kendati memiliki jumlah populasi penduduk yang jauh lebih sedikit dari Indonesia dan luas negara yang juga sangat kecil, ternyata hal ini justru menjadi sebuah keuntungan bagi negara Malaysia. Keuntungan yang dimaksud adalah dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu tinggi ditambah wilayah negara yang relatif kecil membuat pemerintah Malaysia lebih mudah untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, pengawasan terhadap segala macam peraturan yang telah dibuat oleh negara ini juga lebih efektif untuk diimplementasikan. Hal ini dapat terlihat dari IPM negara Malaysia yang masuk kedalam urutan ke-52 secara global.⁶⁷ Sebagai negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk dan luas wilayah yang kecil pencapaian tersebut merupakan hal yang luar biasa bagi Malaysia. Hal ini juga menjadi bukti bahwa upaya Malaysia semenjak lepas dari jajahan bangsa Inggris dan mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 untuk menjadi negara yang independen perlahan-lahan mendapatkan hasil yang cukup baik.⁶⁸

Salah satu unsur yang memiliki kontribusi terhadap tingkat IPM adalah pendidikan. Melalui pendidikan maka akan dihasilkan manusia-manusia yang lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan manusia lainnya. Sebagai negara yang juga memiliki perhatian khusus pada pendidikan, Malaysia telah membuat banyak kemajuan dalam bidang pendidikan di negaranya. Termasuk didalamnya ialah peningkatan akses terhadap pendidikan pra-sekolah dan sekolah menengah,

⁶⁶ Index Mundi. 2017. *Malaysia Ppopulation*. Diakses dari <http://www.indexmundi.com/malaysia/population.html> pada 28 April 2017

⁶⁷World Economic Forum (WEF). 2016. *Human Capital Outlook Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*. Kuala Lumpur: *World Economic Forum*. Halaman 1

⁶⁸ Central Intelligence Agency (CIA). 2017. *The World Factbook Malaysia*. Diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html> pada 28 April 2017

memperluas kesempatan bagi generasi muda di negaranya untuk mendapat pendidikan tinggi, mengupayakan beberapa langkah-langkah yang dapat menyebabkan munculnya ketidakadilan dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan sebanyak-banyaknya kepada anak-anak yang kurang mampu, meminimalisir *gap* antara wilayah perkotaan dan pedesaan, memperbaiki fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah, melakukan penyebaran guru yang berkualitas ke seluruh wilayah negara.⁶⁹

Berkaitan dengan pendidikan di negaranya, Malaysia telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan dalam perkembangan pendidikan di Malaysia. Adapun peraturan tersebut ialah, (1). Undang-Undang Pendidikan tahun 1996 (UU 550), (2). Undang-Undang Pendidikan Khusus tahun 1997, (3). Undang-Undang Dasar tahun 2001 (UU 611), (4). Kebijakan Nasional tentang Penyandang Cacat (Pasal 23 CRC), (5). Kebijakan Nasional tentang Anak Adat (Pasal 30 dari CRC), (6). Undang-Undang Penyandang Cacat 2008 (UU 685), (7). Undang-Undang Penduduk Aborigin tahun 1954. Selain peraturan perundang-undangan tersebut, Malaysia juga memiliki beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem pendidikan yang ada di Malaysia. Keberadaan kebijakan ini sebenarnya menjadi pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada di Malaysia. Tujuannya adalah, guna mencapai kepentingan-kepentingan khususnya dalam bidang pendidikan di negara tersebut. Beberapa kebijakan tersebut ialah, (1). Kebijakan Nasional untuk Perempuan tahun 1985 dan tahun 2009, (2). Cetak biru tentang Belajar seumur hidup untuk Malaysia tahun 2011-tahun 2020, (3). Rencana Strategis Pendidikan Tinggi Nasional: 2020, (4). Program untuk Memberantas buta huruf 1961, (5). Kebijakan Perlindungan Nasional untuk

⁶⁹ EP-Nuffic. 2015. *The Malaysian education system described and compared with the Dutch system.*

Diakses

dar

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwj72J-vm8bUAhXGr48KHT4XBGgQFghSMAY&url=https%3A%2F%2Fwww.nuffic.nl%2Fen%2Fpublications%2Ffind-a-publication%2Feducation-system-malaysia.pdf&usq=AFQjCNGUhGjWax5_Rflgsrgbxo8jw0YBgA&sig2=60XRYm1Bej2fsb6hbbY5GA pada 1 Mei 2017

Anak tahun 2009, (6). Kebijakan Nasional untuk Warga Negara Muda 2011, (7). Kebijakan Nasional Penyandang Cacat 2007.⁷⁰

Sama seperti negara lain pada umumnya, Malaysia juga mengupayakan agar semua anak di negaranya mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Sistem pendidikan terbagi menjadi 6 tahun untuk pendidikan dasar di negara Malaysia, 3 tahun untuk pendidikan menengah pertama, dan 2 tahun untuk pendidikan lanjutan. Pada kategori pendidikan dasar untuk anak usia dini, negara ini menetapkan batasan usia yaitu empat sampai dengan lima tahun, dan usia minimum untuk masuk pada sekolah dasar ialah tujuh tahun.⁷¹ Berdasarkan data *Departement of Statistic Malaysia*, jumlah anak di negara ini ialah sebanyak 7,7 juta jiwa pada tahun 2016. Hal ini berarti, sekitar 24,5% penduduk Malaysia merupakan anak-anak yang berusia sekolah. Dari jumlah tersebut, 198 ribu diantaranya merupakan anak yang masuk kedalam kategori pendidikan anak usia dini (*TK dan play group*), 100 ribu orang diantaranya merupakan anak perempuan dan 98 ribu diantaranya merupakan anak laki-laki.⁷²

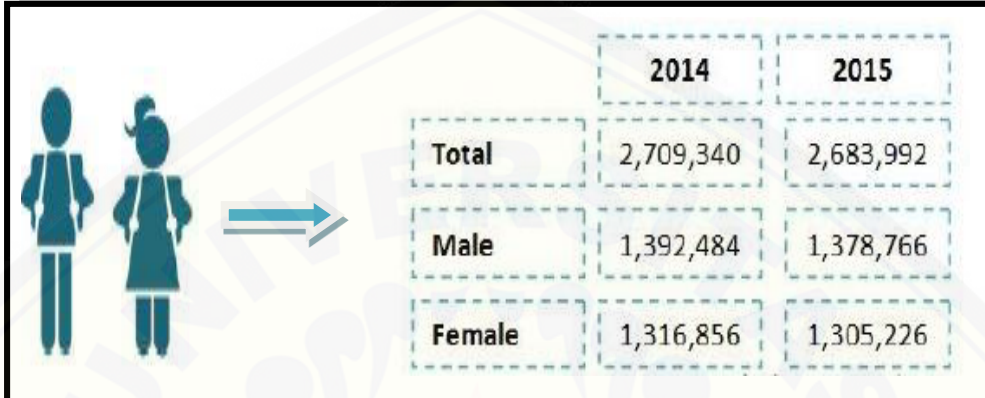
⁷⁰ Education For All (EFA). 2015. *Malaysia Education for All 2015 National Review*. Incheon: Education For All (EFA). Halaman 5-6

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Departement of Statistic Malaysia. 2017. *Population & Demography*. Diakses dari https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/ctwoByCat&parent_id=99&menu_id=TE5CRUZCblh4ZTZMODZlbnk2aWRROT09 pada 1 Mei 2017

Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pendidikan di Malaysia berikut ialah data partisipasi anak pada pendidikan dasar di Malaysia tahun 2016:

Tabel 3.2 Jumlah Partisipasi Anak Pada Pendidikan Dasar di Malaysia pada Tahun 2016



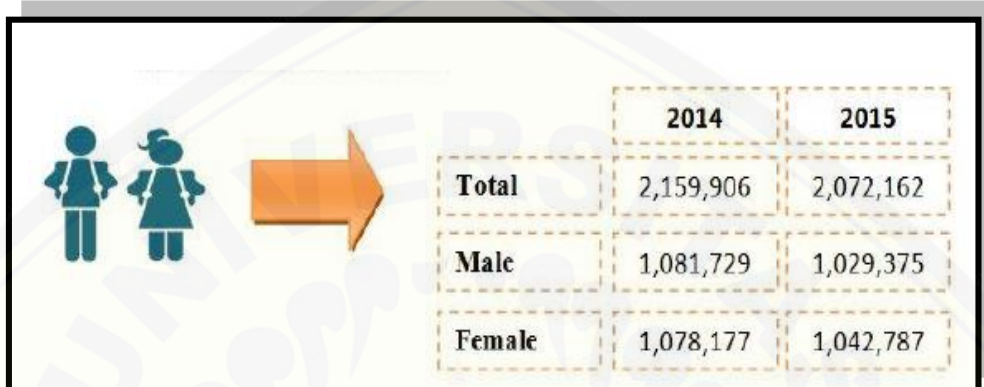
| | 2014 | 2015 |
|---------------|-----------|-----------|
| Total | 2,709,340 | 2,683,992 |
| Male | 1,392,484 | 1,378,766 |
| Female | 1,316,856 | 1,305,226 |

Sumber: *Departement of Statistic Malaysia. 2016. PRESS RELEASE CHILDREN STATISTICS, MALAYSIA 2016. Malaysia: Departement of Statistic Malaysia. Halaman 1*

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah anak yang berpartisipasi pada pendidikan dasar di Malaysia pada tahun 2015 berjumlah 2,6 juta anak. Apabila dilihat berdasarkan *gender*, jumlah anak laki-laki dan perempuan yang berpartisipasi pada pendidikan dasar di Malaysia dapat dikatakan sama, jumlah anak laki-laki sebanyak 1,37 juta dan jumlah anak perempuan sebanyak 1,30 juta. Tingginya jumlah partisipasi anak untuk bersekolah pada tingkat pendidikan dasar di Malaysia tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia untuk menjamin seluruh anak di Malaysia mendapatkan pendidikan yang layak.

Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pendidikan di Malaysia berikut ialah data jumlah partisipasi anak pada sekolah menengah (*Secondary School*) di Malaysia pada tahun 2016:

Tabel 3.3 Jumlah Partisipasi Anak pada Sekolah Menengah (*Secondary School*) di Malaysia pada tahun 2016



| | 2014 | 2015 |
|---------------|-----------|-----------|
| Total | 2,159,906 | 2,072,162 |
| Male | 1,081,729 | 1,029,375 |
| Female | 1,078,177 | 1,042,787 |

Sumber: *Departement of Statistic Malaysia*. 2016. *PRESS RELEASE CHILDREN STATISTICS, MALAYSIA 2016*. Malaysia: *Departement of Statistic Malaysia*. Halaman 2

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa total jumlah anak yang berpartisipasi pada sekolah menengah di Malaysia ialah sebanyak 2 juta anak. Dari jumlah tersebut jumlah siswa laki-lakin ialah sebanyak 1,029 juta anak dan jumlah anak perempuan sebanyak 1,042 juta anak. Kedua data yang telah diuraikan, baik data partisipasi anak dalam pendidikan dasar dan partisipasi anak pada sekolah menengah menunjukkan bahwa secara umum anak di Malaysia sudah dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan di sekolah. Tingginya jumlah anak di Malaysia yang dapat bersekolah karena pemerintah negara ini melakukan berbagai upaya-upaya untuk menjamin anak di negaranya mendapatkan pendidikan yang layak. Secara umum, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia melalui tiga cara, yaitu pemberian bantuan untuk siswa yang kurang mampu, program pemberian makanan yang bergizi, dan program pemberian susu untuk anak di sekolah. Berdasarkan data *Departement of Statistic Malaysia* pada tahun 2016, pemberian dana bantuan dilakukan kepada 924 ribu siwa kurang mampu di Malaysia,

pemberian makanan yang bergizi dilakukan kepada 531 ribu anak, dan pemberian susu dilakukan kepada 1,367 juta anak.⁷³

3.3 Pendidikan di Singapura

Kendati sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara merupakan negara yang sedang berkembang, Singapura tumbuh menjadi satu-satunya negara maju yang ada di kawasan tersebut. Meskipun negara ini hanya memiliki luas wilayah 716 km² dan jumlah penduduk sebanyak 5,5 juta jiwa (estimasi *Departement of Statistic Singapore* pada tahun 2016), namun ternyata keadaan ini justru menjadi keuntungan bagi negara ini. Luas wilayah yang kecil ditambah dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak menyebabkan pemerintah dapat dengan mudah untuk memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai, sehingga kesejahteraan masyarakat juga semakin mudah dicapai di negara ini.⁷⁴ Berdasarkan data *Singapore Demographics Profile* jumlah anak di Singapura ialah sebanyak 747 ribu anak. Hal ini berarti sekitar 12,94% dari jumlah penduduk di Singapura merupakan anak-anak. Dari data tersebut, jumlah anak laki-laki ialah sebanyak 382 ribu anak, dan jumlah anak perempuan ialah sebanyak 365 ribu anak.⁷⁵

Keberhasilan pemerintah Singapura dalam hal kesejahteraan rakyat terbukti dengan masuknya negara ini kedalam urutan ke-24 sebagai negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaik di dunia.⁷⁶ Pencapaian ini merupakan hal yang luar biasa untuk negara Singapura karena merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki IPM terbaik. Salah satu tolak ukur yang juga menentukan IPM dalam suatu negara ialah pendidikan. Dalam hal pendidikan Singapura masuk kedalam urutan sepuluh besar negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Untuk mendapatkan hal tersebut tentunya negara ini telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta

⁷³*Departement of Statistic Malaysia*. Op. Cit., halaman 5

⁷⁴*Departement of Statistic Singapore*. 2017. Population and Population Structure. Diakses dari <http://www.singstat.gov.sg/statistics/browse-by-theme/population-and-population-structure> pada 2 Mei 2017

⁷⁵*Ministry of Education Singapore*. 2008. *A part of Singapore's success story*. Singapore: Ministry of Education Singapore. Halaman 1-2

⁷⁶ *World Economic Forum (WEF)*. Loc.Cit

menjamin setiap anak di negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa ada perbedaan *gender*, ras, suku, dan agama. Peraturan mengenai pendidikan di Singapura telah dijelaskan dalam Undang-Undang Pendidikan Tahun 1957, dan Undang-Undang Wajib Belajar (Cap 51) Tahun 2000.⁷⁷

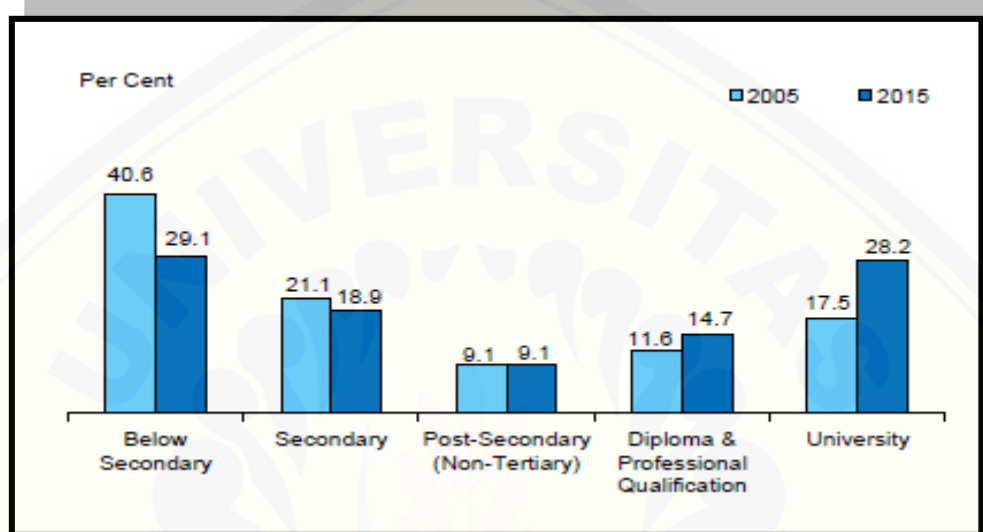
Sistem pendidikan di Singapura terbagi menjadi tiga, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan pasca-menengah. Pada tahapan pendidikan dasar, anak-anak di Singapura terlebih dahulu memasuki tahapan pra-sekolah (TK atau kelompok belajar lainnya). Pada tahapan pra-sekolah ini waktu yang ditetapkan oleh pemerintah Singapura ialah dua tahun dengan usia anak empat sampai enam tahun. Pada tahapan selanjutnya, ialah tahapan pendidikan dasar dimana waktu yang ditetapkan oleh pemerintah Singapura ialah enam tahun dengan usia anak 6 sampai dengan 12 tahun. Agar dapat meneruskan sekolah ke jenjang berikutnya, anak di Singapura diwajibkan mengikuti ujian akhir yang dikenal dengan *Primary School Leaving Examination* (PSLE). Hasil dari ujian akhir tersebut akan digunakan untuk mendaftar ke sekolah jenjang berikutnya. Tahapan selanjutnya ialah pendidikan menengah, waktu yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pendidikan menengah di Singapura ialah empat sampai dengan lima tahun, tergantung dengan pilihan masing-masing siswa, memilih jalur *express* yang memakan waktu empat tahun atau jalur normal lima tahun. Untuk dapat meninggalkan sekolah pada tahapan ini, anak di Singapura juga diwajibkan untuk mengikuti ujian akhir. Tahapan pendidikan selanjutnya di Singapura ialah pendidikan pasca-menengah. Pendidikan pasca-menengah ialah pendidikan tinggi yang ada di Singapura, seperti, Universitas, Politeknik, atau perguruan tinggi kejuruan lainnya.⁷⁸

⁷⁷ EP-Nuffic. 2016. *The Singaporean Education System Described and Compared with the Dutch System*. Singapore: EP-Nuffic. Halaman 6

⁷⁸ *Ibid.*

Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pendidikan di Singapura, berikut adalah data jumlah partisipasi anak di Singapura dalam pendidikan pada periode tahun 2005 dan tahun 2015:

Gambar 3.3 Jumlah Partisipasi Anak di Singapura dalam Pendidikan pada Periode tahun 2005 dan 2015



Sumber: *Ministry of Education Singapore. 2016. Education Statistics Digest 2016. Malaysia: Ministry of Education Singapore. Halaman 5*

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2015 jumlah anak yang berpartisipasi pada pendidikan dasar berjumlah sekitar 29,1%. Pada tahapan selanjutnya ialah jumlah anak yang berpartisipasi pada sekolah menengah yang berjumlah 18,9%. Pada tahapan selanjutnya ialah jenjang pasca-menengah (bukan pendidikan tinggi), jumlah anak yang berpartisipasi berjumlah 9,1%. Pada tahapan diploma, jumlah anak yang berpartisipasi ialah 14,7%. Terakhir ialah jenjang universitas, jumlah anak di Singapura yang berpartisipasi pada jenjang ini sebesar 28,3%.

3.4 Pendidikan di Thailand

Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang tergolong sebagai negara berkembang. Negara ini memiliki jumlah populasi penduduk sekitar 68 juta jiwa (estimasi *Departement of Statistic Thailand* tahun 2016). Sama halnya

dengan negara berkembang pada umumnya di Asia Tenggara, Thailand juga dihadapkan pada berbagai permasalahan dalam negerinya, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan lain sebagainya. Kendati mengalami permasalahan sama seperti negara berkembang pada umumnya, namun negara ini tetap mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Berdasarkan data WEF pada tahun 2015, Thailand menempati urutan ke-57 secara global.⁷⁹ Keberhasilan ini diraih dengan upaya dan kerja keras dari Pemerintah Thailand, baik itu dalam hal kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan yang tidak kalah penting ialah melalui bidang pendidikan. Berdasarkan data *Department of Statistic Thailand*, total jumlah anak yang ada di negara ini sebanyak 11 juta anak. Hal ini berarti sekitar 17% dari jumlah penduduk di Thailand merupakan anak-anak.⁸⁰ Berkaitan dengan pendidikan, Thailand telah memiliki aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Pendidikan tahun 1999.⁸¹

Undang-Undang Pendidikan tahun 1999 yang dimiliki oleh Thailand memiliki peran yang sangat besar bagi perkembangan pendidikan di negara ini. adapun beberapa hal penting yang berkaitan dengan pendidikan di Thailand ialah, (1). pendidikan wajib bagi semua anak di Thailand, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, (2). reformasi kurikulum dalam pendidikan dasar, kejuruan dan pendidikan tinggi, dengan penekanan khusus pada kebutuhan masyarakat Thailand, (3). pembentukan Kantor Standar Nasional Pendidikan dan Penilaian Mutu (ONESQA).⁸² Sejak tahun 2003, Thailand telah menetapkan sistem wajib belajar di negaranya selama sembilan tahun bagi anak yang berusia 6 sampai dengan 15 tahun, yang meliputi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Pendidikan dasar di Thailand terdiri dari pendidikan pra-sekolah wajib untuk anak-anak berusia antara 3 dan 6 dan 6 tahun pendidikan dasar untuk anak-anak

⁷⁹ WEF. Loc. Cit

⁸⁰ *Department of Statistic Thailand*. 2017. *Statistics*. Diakses dari <http://www.rd.go.th/publish/5999.0.html> pada 2 Mei

⁸¹ *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*. 2016. *Reviews of National Policies for Education Education in Thailand. Thailand: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*. Halaman 39

⁸² EP-Nuffic. 2016. *The Thai education system described and compared with the Dutch system. Thailand: EP-Nuffic*. Halaman 8-9

berusia 6 sampai 12 tahun. Pendidikan menengah di Thailand dibagi menjadi 2 siklus dalam waktu 3 tahun, *Matayom* I-III dan *Matayom* IV-VI. Pendidikan tinggi di Thailand terdiri atas beberapa macam, yaitu, universitas, lembaga teknis, perguruan tinggi profesional dan teknik, dan perguruan tinggi guru. Pendidikan tinggi di Thailand dibagi antara 2 jenis institusi. Pertama, institusi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, seperti universitas negeri dan institusi swasta untuk pendidikan tinggi, institusi teknis atau profesional dan pertanian, dan sekolah pelatihan guru. Kedua, lembaga pelatihan khusus yang berada di bawah berbagai kementerian atau organisasi pemerintah.⁸³

Berdasarkan data *Departement of statistics Thailand*, jumlah anak yang berpartisipasi pada jenjang pendidikan anak usia dini ialah sebanyak 7,409 ribu anak. Pada jenjang pendidikan dasar jumlah anak yang berpartisipasi ialah sebanyak 42 ribu anak. Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pendidikan di Thailand, berikut ialah data jumlah sekolah yang ada di negara tersebut:

Tabel 3.4 Jumlah Sekolah di Thailand Tahun 2016

| | Government | Private | Total |
|--|------------|---------|-------|
| Early Childhood Development | | | |
| ECCD Centre ¹ | 231 | 59 | 290 |
| School Education | | | |
| 1) Primary School | 307 | 14 | 321 |
| 2) Lower Secondary School | 68 | 1 | 69 |
| 3) Middle Secondary School | 71 | 2 | 73 |
| 4) Higher Secondary School | 40 | 19 | 59 |
| Sub Total (1-4) | 486 | 36 | 522 |
| Extended Classrooms | 96 | - | 96 |
| Central Schools ² | 51 | - | 51 |
| Schools with SEN Programme & Special Institutes ³ | 12 | 2 | 14 |
| Institutes | | | |
| Tertiary Institutes within Bhutan | 12 | 2 | 14 |
| Technical Training Institutes | 8 | - | 8 |
| Other forms of Education | | | |
| Monastic Education (Lobdra, Shedra, etc) ⁴ | 200 | - | 200 |
| Continuing Education Centres | - | 7 | 7 |
| Non-Formal Centres | 674 | - | 674 |

Sumber: *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*. 2016. *Reviews of National Policies for Education Education in Thailand. Thailand:*

⁸³EP-Nuffic. Op.Cit., halaman 7

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Halaman 32

Pada jenjang sekolah menengah pertama jumlah anak yang berpartisipasi ialah sebanyak 32,9 ribu anak. Pada jenjang sekolah menengah atas jumlah anak yang berpartisipasi ialah sebanyak 48 ribu anak. Pada jenjang pendidikan tinggi ialah sebanyak 15 ribu anak. Berdasarkan tabel pada halaman sebelumnya dapat dijelaskan bahwa jumlah sekolah untuk pendidikan anak usia dini ialah sebanyak 290 sekolah. Jumlah sekolah dasar ialah 321 sekolah. Jumlah sekolah menengah pertama ialah 69 sekolah. Jumlah sekolah menengah atas ialah 73 sekolah dan jumlah perguruan tinggi ialah sebanyak 59. Selain jumlah sekolah, pendidikan di Thailand juga dapat digambarkan melalui banyaknya jumlah guru dan tenaga pengajar lainnya di Singapura. Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pendidikan di Thailand, berikut ialah jumlah guru dan tenaga pengajar lainnya pada tahun 2016:

Tabel 3.5 Jumlah Guru dan Tenaga Pengajar Lainnya di Singapura pada Tahun 2016

| | Government | | | Private | | | Total | | |
|--|------------|--------|-------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|
| | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total |
| ECCD Centres | 9 | 390 | 399 | - | 192 | 192 | 9 | 582 | 591 |
| School Education | | | | | | | | | |
| 1) Primary Schools | 1,434 | 887 | 2,321 | 72 | 148 | 220 | 1,506 | 1,035 | 2,541 |
| 2) Lower Secondary Schools | 858 | 756 | 1,614 | 7 | 5 | 12 | 865 | 761 | 1,626 |
| 3) Middle Secondary Schools | 1,353 | 979 | 2,332 | 39 | 64 | 103 | 1,392 | 1,043 | 2,435 |
| 4) Higher Secondary Schools | 1,163 | 716 | 1,879 | 297 | 152 | 449 | 1,460 | 868 | 2,328 |
| 5) Extended Classrooms | 121 | 30 | 151 | - | - | - | 121 | 30 | 151 |
| Sub-Total (1-5) | 4,929 | 3,368 | 8,297 | 415 | 369 | 784 | 5,344 | 3,737 | 9,081 |
| Central Schools ¹ | 1,334 | 605 | 1,939 | - | - | - | 1,334 | 605 | 1,939 |
| Schools with SEN Programme & Special Institutes ² | 239 | 245 | 484 | 8 | 9 | 17 | 247 | 254 | 501 |
| Tertiary Institutes within Bhutan | 228 | 410 | 638 | 45 | 42 | 87 | 273 | 452 | 725 |
| Technical Training Institutes | 97 | 30 | 127 | - | - | - | 97 | 30 | 127 |
| Non-Formal Centres | 211 | 471 | 682 | - | - | - | 211 | 471 | 682 |

Sumber: *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*. 2016. *Reviews of National Policies for Education Education in Thailand. Thailand: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*. Halaman 33

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah guru atau tenaga pengajar untuk sekolah dasar ialah sebanyak 2,541 guru. Jumlah guru dan tenaga pengajar untuk sekolah menengah pertama ialah sebanyak 1,626 guru. Jumlah guru dan tenaga pengajar untuk sekolah menengah atas ialah sebanyak 2,435 guru. Jumlah dosen dan tenaga pengajar untuk perguruan tinggi ialah sebanyak 2,328 guru.

3.5 Pendidikan di Filiphina

Filiphina juga termasuk sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang masuk kedalam kategori negara berkembang. Berdasarkan data *World Bank*, negara ini memiliki jumlah populasi penduduk sebanyak 100,7 juta jiwa pada tahun 2015. Memiliki pendapatan perkapita (GDP) sebesar \$292,4 milyar pada tahun 2015, menjadikan negara ini masuk dalam urutan ke-38 sebagai negara dengan pendapatan perkapita tertinggi di dunia.⁸⁴ Meskipun peringkat Filipina dalam hal pendapatan perkapita tidak terlalu buruk apabila dibandingkan dengan negara lainnya di kawasan Asia Tenggara, namun hal tersebut tidak membuat hilangnya permasalahan-permasalahan kesenjangan dalam negerinya. Menurut data *World Bank*, tingkat kemiskinan di negara ini dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2002 sampai dengan 2012) berada pada kisaran 25%.⁸⁵

Kendati memiliki permasalahan yang sama dengan negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang, hal ini tidak membuat berkurangnya upaya pemerintah Filiphina untuk menyejahterakan penduduknya. Upaya Pemerintah Filiphina ini cukup membuahkan hasil karena berdasarkan data WEF negara ini menempatu urutan ke-46 sebagai negara dengan IPM tertinggi di dunia.⁸⁶ Keberhasilan Pemerintah Filiphina ini salah satunya terlihat dari upayanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negaranya. Telah penulis sebutkan bahwa pendidikan merupakan cara atau sebuah sistem yang dapat digunakan untuk

⁸⁴*World Bank Officoial Website*. 2017. Philipines. Diakses dari <http://data.worldbank.org/country/philippines> pada 3 Mei 2017

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶ WEF. Loc.Cit

memberadabkan manusia. Melalui pendidikan pula, akan dihasilkan manusia yang berkualitas dan layak untuk bersaing.

Lama pendidikan di Filipina telah ditetapkan berlangsung selama 12 tahun. Adapun sistem pendidikan di negara ini terbagi menjadi tiga tahapan yaitu, enam tahun untuk pendidikan dasar, empat tahun untuk pendidikan menengah pertama, dan dua tahun untuk pendidikan menengah atas.⁸⁷ Visi negara untuk pertumbuhan dan pembangunan negara yang inklusif memerlukan investasi pada bidang sumber daya manusia. Hal ini dapat diberikan melalui pendidikan yang berkualitas, teknis pelatihan keterampilan kejuruan yang handal, dan pendidikan tinggi yang relevan dan responsif. Hal ini sebenarnya tertuang dalam *Filiphine Development Plan* 2011-2016. Berdasarkan rencana tersebut, negara ini telah menetapkan enam tujuan utama. Tujuan pertama ialah perawatan dan pendidikan anak usia dini. Pada tahapan ini Pemerintah Filipina benar-benar memfokuskan perhatian pada pemenuhan kualitas pendidikan untuk anak-anak yang berusia dini. Berdasarkan laporan *Education for All* (EFA), terdapat kenaikan jumlah anak usia dini sebanyak 3 persen dari 51.797 ribu anak di 2011 menjadi 53.436 ribu anak pada 2016. Pendaftaran anak usia dini bertambah sebesar 4 persen seperti yang ditunjukkan oleh laporan Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan (DSWD), dari 1.699.888 juta anak pada tahun 2011 menjadi 1.778.274 juta anak pada tahun 2016.⁸⁸

Tujuan kedua ialah meningkatkan pencapaian untuk akses pendidikan dasar bagi anak di Filipina. Pada tujuan ini, Pemerintah Filipina memfokuskan perhatian untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak usia pendidikan dasar di Filipina. Hal ini pula termasuk, pembuatan Undang-undang untuk pendidikan TK untuk lima tahun. Pendaftaran TK di negara ini mengalami kenaikan

⁸⁷*Education For All* (EFA). 2015. *Philippine Education For All 2015: Implementation and Challenges*. Diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj_vrfqMbUAhUMOY8KHyr2AAYQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unescobkk.org%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fefa%2FEFA_MDA%2FNational_EFA_MDA_Reports%2FPhilippines_EFA_MDA_FINAL.pdf&usg=AFQjCNH3aTHYQbemubgQktqvNLwiJUfcDQ&sig2=w5JdpmYuN0echaXP49PsAw pada 3 Mei 2017

⁸⁸*Ibid.*

sekitar 77% pada tahun 2016. Akses untuk ke sekolah dasar dan sekolah menengah telah meningkat untuk periode tahun 2005-2006 (SD 84,44%, sekolah menengah 58,54%) dan periode tahun 2010-2016 (SD, 95,92%, sekolah menengah 64,30%). Tujuan ketiga ialah pemberian pelajaran dan keterampilan untuk generasi muda dan orang dewasa di Filipina. Berkaitan dengan tujuan ini telah dibentuk sebuah program untuk pendidikan keterampilan dan program pelatihan yang dikenal dengan program *DepEd Tech-voc* (TESDA TVET). Pendaftaran program *DepEd Tech-voc* meningkat 35 persen seperti yang dari 246.012 ribu anak pada periode 2007-2008 menjadi 378.150 ribu anak pada periode 2012-2013. Tujuan keempat ialah meningkatkan jumlah melek huruf untuk orang dewasa di Filipina. Tingkat melek huruf dasar telah meningkat sebanyak 93,4% pada tahun 2003, dan tingkat keaksaraan dasar meningkat menjadi 95,6d% pada tahun 2008. Tujuan kelima ialah kesetaraan *gender* dalam pendidikan. Pada tujuan ini Pemerintah Filipina mengupayakan agar anak laki-laki dan perempuan mendapatkan porsi yang sama dalam hal pendidikan. Tujuan keenam adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Filipina. Pemerintah saat ini telah mengalokasikan pendidikan yang lebih besar, anggaran setiap tahun sejak 2016. *DepEd Tech-Voc* melaporkan telah mengalami peningkatan jumlah guru dengan lebih dari 102.623 guru dan ditambah 43.204 relawan dan guru TK.⁸⁹

3.6 Pendidikan di Brunei Darrussalam

Negara selanjutnya yang juga termasuk dalam kategori sebagai negara berkembang di kawasan Asia Tenggara ialah Brunei Darrussalam. Berdasarkan data *world bank*, jumlah populasi penduduk di wilayah ini ialah 423,188 ribu jiwa pada tahun 2015. *World bank* juga mencatat bahwa pendapatan perkapita negara ini ialah sebesar \$12,93 milyar pada tahun 2015. Jumlah ini mengalami penurunan

⁸⁹*Education For All* (EFA). 2015. *Philippine Education For All 2015: Implementation and Challenges*. Diakses dari

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj_vrfqMbUAhUMOY8KHyr2AAYQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unescobkk.org%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fefa%2FEFA_MDA%2FNational_EFA_MDA_Reports%2FPhilippines_EFA_MDA_FINAL.pdf&usg=AFQjCNH3aTHYQbemubgQktqvNLwiJUfcDQ&sig2=w5JdpmYuN0echaXP49PsAw pada 3 Mei 2017

apabila dibandingkan dengan jumlah pada tahun sebelumnya yaitu \$17,94 milyar pada tahun 2014. Memiliki jumlah pendapatan perkapita sekitar \$12,9 milyar menjadikan negara ini berada pada urutan ke-120 secara global.⁹⁰ Meskipun negara ini mengalami penurunan dalam hal pendapatan perkapita, namun hal tersebut tidak membuat usaha Pemerintah Brunei Darrussalam untuk berkomitmen dalam menyejahterakan rakyatnya menjadi berkurang.

Menurut data UNDP, Brunei Darrussalam masuk kedalam urutan ke-30 sebagai negara dengan tingkat IPM terbaik secara global (dari 188 negara).⁹¹ Urutan ini tentu merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa bagi negara ini. Keberhasilan Brunei Darrussalam untuk menempati urutan ke-30 karena negara ini memiliki luas wilayah yang tidak terlalu besar ditambah dengan jumlah populasi penduduk yang tidak banyak. Oleh karena itu segala peraturan yang dibuat untuk menyejahterakan rakyatnya lebih mudah untuk diimplementasikan di negara ini.

Untuk mengetahui lebih lanjut berikut ialah data tren IPM di Brunei Darrussalam periode tahun 1990-2015 berdasarkan faktor penunjangnya:

**Tabel 3.6 Tren IPM di Brunei Darrussalam Periode tahun 1990-2015
Berdasarkan Faktor Penunjangnya**

| | Life expectancy at birth | Expected years of schooling | Mean years of schooling | GNI per capita (2011 PPP\$) | HDI value |
|------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1990 | 72.9 | 12.1 | 7.5 | 85,280 | 0.782 |
| 1995 | 74.1 | 12.9 | 8.1 | 86,752 | 0.805 |
| 2000 | 75.2 | 13.4 | 8.3 | 82,716 | 0.819 |
| 2005 | 76.2 | 14.3 | 8.5 | 83,716 | 0.837 |
| 2010 | 77.6 | 14.1 | 8.8 | 79,020 | 0.846 |
| 2011 | 77.9 | 14.4 | 8.8 | 79,127 | 0.852 |
| 2012 | 78.2 | 14.9 | 8.9 | 78,888 | 0.860 |
| 2013 | 78.5 | 15.0 | 8.9 | 77,096 | 0.863 |
| 2014 | 78.8 | 14.9 | 9.0 | 74,226 | 0.864 |
| 2015 | 79.0 | 14.9 | 9.0 | 72,843 | 0.865 |

⁹⁰World Bank Official Website. 2017. Brunei Darrussalam. Diakses dari <http://data.worldbank.org/country/brunei-darussalam> Pada 3 Mei 2017

⁹¹WEF Loc. Cit

Sumber: UNDP. 2016. *Human Development for Everyone Briefing note for countries on the 2016 Human Development Report Brunei Darussalam*. Brunei Darussalam: UNDP. Halaman 3

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa, angka harapan hidup di Brunei Darussalam selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya, yang tertinggi ialah pada tahun 2015 yaitu 79,0. Sedangkan untuk angka harapan sekolah, negara ini mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif di setiap tahunnya, namun secara umum dapat dikatakan ada peningkatan, meskipun pada tahun 2015 angka harapan sekolah di negara ini sama dengan tahun 2014 yaitu 14,9. Untuk pendapatan perkapita, Brunei Darussalam mengalami penurunan dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2015, puncaknya pada tahun 2015 pendapatan perkapita di negara ini ialah sebesar \$72,843 milyar. Faktor-faktor pendukung inilah yang menyebabkan IPM Brunei Darussalam pada tahun 2015 ialah sebesar 0,86 dan menjadikannya sebagai peringkat ke-30 dunia.

Berkaitan dengan pendidikan di negaranya, Brunei Darussalam memiliki sebuah visi dan reformasi sistem pendidikan. Visi ini terbagi menjadi dua yaitu, Sistem Pendidikan Negara Abad Ke-21 (SPN 21) dan Wawasan 2035 atau *Brunei Vision 2035*. SPN 21 bertujuan untuk meningkatkan struktur pendidikan, meningkatkan kesempatan dalam pendidikan teknik, memperbaiki kurikulum, dan meningkatkan penilaian. Visi Brunei 2035 bertujuan untuk transfer ekonomi Brunei dari yang sangat bergantung pada minyak dan gas bumi ke sumber daya dan industri lainnya.⁹²

3.7 Pendidikan di Myanmar

Myanmar merupakan negara di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 53,9 juta jiwa (berdasarkan estimasi *World Bank* pada tahun 2015). Negara ini memiliki jumlah pendapatan perkapita sebesar \$62,6 milyar. Telah dijelaskan bahwa negara di kawasan Asia Tenggara sebagian besar memiliki permasalahan dalam hal kesenjangan perekonomian negaranya. Hal inilah yang juga terjadi pada Myanmar, negara ini mengalami berbagai permasalahan

⁹² UNDP. *Op.Cit.*, halaman 1-2

yang berkaitan dengan perekonomian di negaranya. Berbagai permasalahan dalam negeri menyebabkan IPM negara ini terbilang rendah. Berdasarkan data WEF, IPM Myanmar berada pada urutan ke-112 dunia pada tahun 2016.⁹³

Kendati mengalami berbagai permasalahan dalam negerinya, Myanmar tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan menjamin kesejahteraan bagi penduduknya. Termasuk dalam hal ini mengenai pendidikan. Sistem pendidikan di Myanmar terbagi kedalam tiga tahapan yaitu, lima tahun untuk pendidikan dasar, empat tahun untuk pendidikan menengah pertama, dan dua tahun untuk pendidikan menengah atas. Total masa pendidikan di negara ini ialah 11 tahun. Myanmar memang telah mengalami berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan sejak tahun 1950-an. Sejak tahun 2012 seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan modal manusia, pemerintah Myanmar telah mulai memperbaiki pendidikan dan sekarang telah membuat pembaharuan sistem pendidikan menjadi prioritas nasional. Dengan anggaran yang meningkat, undang-undang pendidikan nasional yang baru dan penghapusan biaya sekolah umum, reformasi besar di seluruh sektor pendidikan berjalan dengan baik. Namun, tantangan yang signifikan tetap ada.⁹⁴

Pendidikan termasuk dalam prioritas kebijakan utama yang dirumuskan oleh Pemerintah Myanmar dan pentingnya investasi di bidang pendidikan diakui dengan baik. Pengeluaran untuk pendidikan telah meningkat dari 0,7% dari PDB pada periode tahun 2010-2011 menjadi 2,1% dari PDB pada periode tahun 2013-2014.⁹⁵ Rasio pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terhadap PDB secara keseluruhan signifikan dibandingkan dengan rasio masa lalu, kurang dari 1% dari PDB pada periode 2013-2014. Sekitar dua pertiga dari total anggaran pemerintah dalam pendidikan digunakan untuk pendidikan dasar dan sepertiga lagi untuk pendidikan tinggi.⁹⁵ Berikut ialah beberapa penyebab permasalahan pendidikan di Myanmar:

⁹³World Bank Official Website. 2017, Myanmar. Diakses dari <http://www.worldbank.org/en/country/myanmar> pada 3 Mei 2017

⁹⁴WEF. Loc. Cit

⁹⁵Jyrki Härkki. 2017. *Myanmar's education sector*. Diakses dari <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFgfzhsMbUAhVJLI8KHfvBA7wQFghPMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.exportfinland.fi%2Fdocuments%2F10304%2Ffc36da0b-a45d-4819-8472->

1. sektor pendidikan sebagian besar telah dihancurkan oleh militer yang memimpin pada pemberontakan mahasiswa pada tahun 1988.
2. mayoritas sekolah negeri memiliki akses terbatas terhadap buku teks dan persediaan lainnya, dan gaya mengajar didasarkan pada pembelajaran hafalan.
3. infrastruktur sekolah tidak memadai, kekurangan guru dan ruang kelas terlalu padat (rasio murid terhadap guru 28: 1 di sekolah dasar, dan 34: 1 di tingkat menengah) dan keterbatasan akses terhadap sumber daya, seperti perpustakaan di Masyarakat pedesaan.
4. diskriminasi terhadap etnis minoritas, sekolah berbasis masyarakat ditutup oleh pemerintah. Hal ini telah mengintensifkan konflik antara pemberontak dan tentara Myanmar. Dengan tidak adanya sekolah ini, minoritas dipaksa untuk memilih sekolah negeri yang tidak mengajar bahasa ibu mereka.
5. selama era sosialis, selain beberapa perguruan tinggi internasional, semua bentuk pendidikan swasta dilarang di negara ini (sampai 2012).
6. dengan tidak adanya standar pendidikan internasional, banyak siswa dari keluarga kaya memilih untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah-sekolah di luar negeri, dengan Inggris, Amerika Serikat, Australia dan Singapura menjadi tujuan yang paling populer.⁹⁶

3.8 Pendidikan di Kamboja

Kamboja merupakan negara di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 15,58 juta jiwa (berdasarkan estimasi world bank pada tahun 2015). Negara ini memiliki pendapatan perkapita sebesar \$15,58 milyar. Jumlah pendapat perkapita tersebut membuat Kamboja menempati urutan ke-109

[b227dfba122e&usq=AFQjCNHmK6tWoV1003bJHh5_o3AkbsaY-g&sig2=FzFoO_GGu-zDTfy1JVIZvg](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFgfzhsMbUAhVJLI8KHfvBA7wQFghPMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.exportfinland.fi%2Fdocuments%2F10304%2Ffc36da0b-a45d-4819-8472-b227dfba122e&usq=AFQjCNHmK6tWoV1003bJHh5_o3AkbsaY-g&sig2=FzFoO_GGu-zDTfy1JVIZvg) pada 4 Mei 2017

⁹⁶Jyrki Härkki. 2017. *Myanmar's education sector*. Diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFgfzhsMbUAhVJLI8KHfvBA7wQFghPMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.exportfinland.fi%2Fdocuments%2F10304%2Ffc36da0b-a45d-4819-8472-b227dfba122e&usq=AFQjCNHmK6tWoV1003bJHh5_o3AkbsaY-g&sig2=FzFoO_GGu-zDTfy1JVIZvg pada 4 Mei 2017

dunia. Berdasarkan data WEF, IPM di negara ini berada pada urutan ke-97 dunia pada tahun 2016. Meskipun IPM negara ini tidak terlalu baik apabila dibandingkan dengan negara lainnya di kawasan Asia Tenggara namun upaya Kamboja untuk menyejahterakan rakyatnya terus dilakukan.⁹⁷

Telah dijelaskan bahwa salah satu indikator yang menentukan IPM selain kesehatan, kesejahteraan hidup, ialah pendidikan. Berkaitan dengan bidang pendidikan, Pemerintah Kamboja telah menetapkan waktu untuk masa pendidikan di negaranya ialah selama 12 tahun. Sistem tersebut terbagi kedalam tiga tahapan, yaitu enam tahun untuk pendidikan dasar, tiga tahun untuk sekolah menengah pertama, dan tiga tahun untuk sekolah menengah atas. Secara umum, tujuan dari sistem pendidikan yang ada di negara ialah untuk membantu perkembangan mental dan fisik anak.⁹⁸ Dasar hukum bagi pendidikan yang ada di Kamboja ialah pasal 65 konstitusi 1993 dan telah diamandemen pada tahun 1999.⁹⁹

Berkaitan dengan pendidikan, kamboja memiliki sebuah program yang dikenal dengan Rencana Strategis Pendidikan (ESP) Kamboja 2014-2018 sesuai dengan Visi 2030 negara tersebut untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan, kompetitif dan harmonis. ESP berfokus pada 7 sub-sektor utama (pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan teknis, pendidikan tinggi, pendidikan non-formal, pengembangan pemuda, dan pendidikan jasmani dan olahraga) dan mendefinisikan tiga kebijakan utama untuk mencapai tujuan yang diharapkan:

Kebijakan 1: Memastikan akses yang setara untuk semua layanan pendidikan

Kebijakan 2: Meningkatkan kualitas dan relevansi pembelajaran

Kebijakan 3: Memastikan kepemimpinan dan manajemen staf pendidikan yang efektif di semua tingkat.¹⁰⁰

⁹⁷World Bank Official Website. 2017. Kamboja. Diakses dari <http://www.worldbank.org/en/country/cambodia> pada 3 Mei 2017

⁹⁸ UNESCO. 2011. *World Data on Education Cambodia*. Cambodia: UNESCO. Halaman 2

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰

Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan ESP ialah, perawatan dan pendidikan anak usia dini (*Early Childhood and education expansion / ECE*) bertujuan meningkatkan pendaftaran di layanan perawatan pra-sekolah dan berbasis rumah bagi orang miskin, etnis minoritas, dan anak-anak penyandang cacat. Tingkatkan pendaftaran 5 tahun di sekolah pra-sekolah sampai 80% di tahun 2017-2018. Pendidikan dasar dan menengah, bertujuan memastikan semua anak usia sekolah didaftarkan dan dipertahankan sampai akhir tahun ajaran dan siklus. Mengatur pembangunan sekolah, terutama untuk meningkatkan sekolah menengah pertama. Perluas program beasiswa di pendidikan dasar dan menengah. Sistem mutu sekolah dan penjaminan mutu, bertujuan mengembangkan kerangka kerja dan alat yang berkualitas untuk membangun kapasitas sekolah prasekolah, sekolah dasar dan menengah, dan guru untuk memenuhi standar pelayanan. Ini termasuk pelatihan guru; Penyediaan buku teks; Pelatihan kepala sekolah; Laboratorium untuk sains, komputer dan bahasa asing; Workshop untuk magang belajar dan bidang olah raga. Pendidikan teknik dan kejuruan, bertujuan melaksanakan kerangka kualifikasi nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan teknik dan kejuruan. Pendidikan tinggi, bertujuan untuk reformasi sistematis terhadap sistem pendidikan tinggi untuk mewujudkannya sesuai dengan standar regional dan internasional. Menurut data nasional, Kamboja mengalokasikan 18,31% anggarannya untuk sektor pendidikan pada tahun 2016, dengan tujuan mencapai 23% pada tahun 2020.¹⁰¹

3.9 Pendidikan di Laos

Laos merupakan negara di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 6,8 juta jiwa (berdasarkan estimasi *world bank* pada tahun 2015). Negara ini memiliki pendapatan perkapita sebesar \$12,37 milyar. Jumlah pendapat perkapita tersebut membuat Laos menempati urutan ke-124 dunia.¹⁰²

¹⁰¹*Global Partnerships*. 2017. Cambodia. Diakses dari <http://www.globalpartnership.org/country/cambodia> pada 3 Mei 2017

¹⁰²*World Bank Official Website*. 2017. Cambodia. Diakses dari <http://www.worldbank.org/en/country/cambodia> pada 3 Mei 2017

Berdasarkan data WEF, IPM di negara ini berada pada urutan ke-105 dunia pada tahun 2016.¹⁰³ Meskipun IPM negara ini tidak terlalu baik apabila dibandingkan dengan negara lainnya di kawasan Asia Tenggara namun, sama seperti negara di kawasan Asia Tenggara pada umumnya, upaya pemerintah Laos untuk menyejahterakan rakyatnya terus dilakukan.

Pemerintah Laos telah menetapkan waktu untuk masa pendidikan di negaranya ialah selama 12 tahun. Sistem tersebut terbagi kedalam tiga tahapan, yaitu lima tahun untuk pendidikan dasar, empat tahun untuk sekolah menengah pertama, dan tiga tahun untuk sekolah menengah atas. Secara umum, tujuan dari sistem pendidikan yang ada di negara ini ialah untuk membantu perkembangan mental dan fisik anak. Pemerintah Laos menganggap bahwa pendidikan sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Negara ini sangat bergantung pada dana eksternal, namun hal itu telah menunjukkan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data pemerintah, pada 2013/14, porsi pendidikan dari anggaran pemerintah adalah 15,5%, naik dari 13,4% di tahun 2009/10. Negara ini telah mencapai kemajuan yang signifikan, mencapai 98,6% pendaftaran bersih primer dan tingkat paritas gender sebesar 0,99 untuk pendidikan dasar. Tantangan utama yang dihadapi sistem pendidikan adalah: mengurangi tingkat putus sekolah yang tinggi, meningkatkan kesetaraan, dan meningkatkan hasil belajar.¹⁰⁴

Berkaitan dengan masalah pendidikan Pemerintah Laos telah membuat sebuah program yang dikenal dengan Rencana strategis pendidikan Laos 2016-2020. Adapun beberapa fokus yang telah ditetapkan oleh program ini ialah:

1. mewujudkan wajib pendidikan dasar dan memperluas wajib belajar untuk mengikutsertakan pendidikan menengah ke bawah
2. membasmi buta huruf, di semua kelompok etnis, dengan mendukung pembelajaran seumur hidup yang relevan

¹⁰³ WEF. *Loc. Cit*

¹⁰⁴ *Global Partnerships*. 2017. Lao Diakses dari <http://www.globalpartnership.org/country/lao-pdr> pada 3 Mei 2017

3. memperluas, memperkuat, dan mempromosikan pendidikan menengah, pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan, dan pendidikan tinggi untuk menanggapi tuntutan pasar tenaga kerja di masa depan dan meningkatkan hasil ekonomi
4. meningkatkan daya tanggap sistem pendidikan kejuruan teknis dan pelatihan
5. memastikan lulusan memiliki kompetensi untuk memasuki dunia kerja dengan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan panggilan teknis
6. memastikan bahwa teknis, profesional, dan akademisi memiliki pengetahuan dan mampu menggunakan teknologi dan sains modern
7. meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan untuk memberi generasi muda pengetahuan yang dibutuhkan untuk pengembangan sosio-ekonomi
8. menerapkan TIK sebagai alat untuk meningkatkan administrasi pendidikan dan manajemen dan kualitas pendidikan
9. memperluas penelitian dan evaluasi kebijakan pendidikan dari tingkat pusat sampai daerah
10. memperluas pendidikan jasmani dan olahraga dari tingkat pusat ke daerah.¹⁰⁵

3.10 Pendidikan di Vietnam

Vietnam merupakan negara di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 91,7 juta jiwa (berdasarkan estimasi *world bank* pada tahun 2015). Negara ini memiliki pendapatan perkapita sebesar \$193 milyar. Jumlah pendapat perkapita tersebut membuat Vietnam menempati urutan ke-47 dunia.¹⁰⁶ Berdasarkan data WEF, IPM di negara ini berada pada urutan ke-59 dunia pada tahun 2016.¹⁰⁷ Meskipun IPM negara ini tidak terlalu baik apabila dibandingkan dengan negara lainnya di kawasan Asia Tenggara namun, sama

¹⁰⁵ *Global Partnerships*. 2017. Vietnam. Diakses dari <http://www.globalpartnership.org/country/vietnam> pada 3 Mei 2017

¹⁰⁶ *World Bank Official Website*. 2017. Vietnam. Diakses dari <http://www.worldbank.org/en/country/vietnam> pada 3 Mei 2017

¹⁰⁷ WEF. *Loc. Cit*

seperti negara di kawasan Asia Tenggara pada umumnya, upaya Pemerintah Vietnam untuk menyejahterakan rakyatnya terus dilakukan.

Pemerintah Vietnam telah menetapkan waktu untuk masa pendidikan di negaranya ialah selama 12 tahun. Sistem tersebut terbagi kedalam tiga tahapan, yaitu lima tahun untuk pendidikan dasar, empat tahun untuk sekolah menengah pertama, dan tiga tahun untuk sekolah menengah atas. Pendidikan masuk kedalam salah satu prioritas nasional. Pemerintah telah mengeluarkan 20% anggaran untuk pendidikan semenjak tahun 2008. Komitmen kuat pemerintah terhadap pendidikan dan dukungan budaya dan sosial yang telah berlangsung lama untuk pendidikan telah membawa kemajuan yang signifikan di sektor ini. Vietnam memiliki tingkat penyelesaian sekolah dasar yang tinggi, paritas gender yang kuat, rasio siswa atau guru yang rendah, dan tingkat pendidikan yang rendah. Kebijakan negara standar tingkat mutu sekolah dasar memberikan akses universal terhadap pendidikan dan memastikan bahwa kondisi minimal terpenuhi di setiap sekolah dasar.

Berkaitan dengan masalah pendidikan di negaranya, Vietnam telah menetapkan sebuah program yang dikenal dengan Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan EDSP. Tujuan EDSP adalah untuk merenovasi sistem pendidikan, mendekati standar kualitas regional dan internasional, dan memastikan keadilan sosial dan kesempatan belajar seumur hidup. Tujuan EDSP lebih lanjut ialah:

1. mewujudkan pendidikan anak usia dini dan perawatan universal untuk memastikan bahwa semua anak memiliki perkembangan intelektual, emosional, dan fisik yang tepat yang diperlukan untuk memasuki sekolah dasar.
2. meningkatkan dan memelihara kualitas pendidikan menengah bawah yang universal dan mengejar pendidikan menengah atas yang universal di daerah yang kurang beruntung secara ekonomi.
3. memperkuat sekolah asrama minoritas etnis dan berikan pendidikan inklusif di semua tingkat.
4. merestrukturisasi sistem pendidikan kejuruan, membangun perguruan tinggi baru yang menanggapi kebutuhan belajar, dan memastikan bahwa siswa

dilengkapi dengan keterampilan profesional untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja internasional.

5. memperluas pendidikan tinggi non-publik dan berikan lebih banyak institusi persiapan universitas untuk etnis minoritas
6. diversifikasi berbagai bentuk pendidikan berkelanjutan dan menciptakan kesempatan belajar seumur hidup untuk terus meningkatkan kualifikasi profesional.¹⁰⁸

3.11 Pendidikan di Timor Leste

Timor Leste merupakan negara di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 1,185 juta jiwa (berdasarkan estimasi *world bank* pada tahun 2015). Negara ini memiliki pendapatan perkapita sebesar \$1,442 milyar. Jumlah pendapat perkapita tersebut membuat Timor Leste menempati urutan ke-176 dunia. Sama halnya dengan negara lainnya di kawasan Asia Tenggara namun, pemerintah Timor Leste selalu berkomitmen untuk menyejahterakan rakyatnya.¹⁰⁹ Pemerintah Timor-Leste bertujuan untuk mencapai misinya agar semua individu memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas yang memungkinkan mereka berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Timor-Leste telah membuat kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di tingkat sekolah dan tingkat pendaftaran. Dalam 5 tahun, angka partisipasi murni tumbuh dari 67% menjadi 83% dan perbedaan gender menurun secara signifikan dalam pendidikan dasar.¹¹⁰

Sektor pendidikan Timor-Leste masih menghadapi beberapa tantangan. Dalam pendidikan dasar, tingkat putus sekolah dan tingkat pengulangan tinggi, sementara sekitar setengah dari enam tahun tidak memulai sekolah mereka pada usia yang tepat. Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2011-2030 bertujuan untuk

¹⁰⁸Global Partnerships. 2017. Vietnam. Diakses dari <http://www.globalpartnership.org/country/vietnam> pada 3 Mei 2017

¹⁰⁹World Bank Official Website. 2017. Timor Leste. Diakses dari <http://www.globalpartnership.org/country/timor-leste> pada 3 Mei 2017

¹¹⁰Global Partnerships. 2017. Timor Leste. Diakses dari <http://www.globalpartnership.org/country/timor-leste> pada 3 Mei 2017

mencapai penyelesaian universal pendidikan dasar, menghilangkan buta huruf, dan memastikan kesetaraan gender melalui program prioritas, strategi, dan kegiatan di pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, tinggi, dan berulang.¹¹¹

Hal-hal yang berkaitan dengan rencana strategis pendidikan usia dini ialah, (1). memberikan rencana revisi untuk memanfaatkan bangunan sekolah dan ruang kelas, serta perabotan dan bahan ajar yang memadai, (2). mempersiapkan dan menerapkan strategi untuk merangsang kemitraan tujuan publik untuk pengembangan sektor baru di kelas baru dan kebijakan akreditasi sekolah, (3). mengembangkan dan menerapkan kerangka kurikulum baru, dan (4). mengembangkan pelatihan guru in-service dan pre-service baru, dan rekrutmen atau penugasan kembali guru. Dalam hal pendidikan dasar ialah, (1). menyediakan rencana revisi untuk memanfaatkan gedung sekolah untuk mencapai kualitas yang adil dan rasio siswa atau guru yang rendah, (2). memastikan perbaikan perabot dan peralatan sekolah untuk memenuhi standar minimum, (3). memperluas alat kebijakan penyertaan sosial untuk memastikan pendaftaran dan retensi termasuk transfer tunai, beasiswa, dan solusi transportasi, (4). memperkenalkan program pembelajaran yang dipercepat untuk mendukung siswa yang kelebihan biaya. Dalam hal pendidikan menengah ialah, (1). memberikan rencana komprehensif untuk pembangunan infrastruktur untuk sekolah menengah dan kejuruan teknis, (2). membuat hubungan formal dengan industri dan pasar untuk memberikan pengalaman langsung di tempat kerja, (3). mengembangkan sebuah program untuk melatih dan menarik guru berbakat ke dalam pendidikan menengah teknik, (4). mengembangkan dan menerapkan kerangka kurikulum baru. Terakhir ialah dalam hal pendidikan tinggi yaitu, (1). mengembangkan sistem antar institusi, membentuk kerangka peraturan, dan mengembangkan program pengembangan kapasitas untuk mengelola, menetapkan sistem pendidikan tinggi, dan mendukung layanan administrasi dengan lebih baik, (2). menetapkan sistem politeknik termasuk menentukan tujuan, struktur, kurikulum, dan pelatihan guru, (3). mengembangkan

¹¹¹Global Partnerships. 2017. Timor Leste. Diakses dari <http://www.globalpartnership.org/country/timor-leste> pada 3 Mei 2017

langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi siswa dan penyelesaian pendidikan tinggi.¹¹²



¹¹²*Global Partnerships*. 2017. Timor Leste. Diakses dari <http://www.globalpartnership.org/country/timor-leste> pada 3 Mei 2017

terlihat gap yang cukup jauh antara negara yang maju dan negara yang sedang berkembang di Asia Tenggara.

Keberadaan Singapura sebagai salah satu contoh negara maju di kawasan Asia Tenggara tentu menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Hal ini kemudian akan memacu negara-negara lainnya untuk lebih mempersiapkan dan membenahi negaranya. Lebih lagi, tujuan utama dari pembentukan regionalisasi yang ada di kawasan Asia Tenggara merupakan ajang untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi persaingan yang lebih kompleks di tingkat global. Selain tantangan, diberlakukannya MEA juga menimbulkan hambatan tersendiri khususnya bagi perkembangan pendidikan di Asia Tenggara. Telah dijelaskan bahwa tingkat pertumbuhan dan pembangunan negara yang berbeda-beda menyebabkan kondisi sosial ekonomi yang berbeda pula antar negara anggota ASEAN. Akibatnya mutu pendidikan juga berbeda-beda antar negara anggota ASEAN.

BAB. 5 KESIMPULAN

Keputusan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk mengintegrasikan kawasan melalui kerja sama dalam bidang perekonomian telah

membawa suatu tantangan dan hambatan tersendiri bagi negara-negara di kawasan tersebut. Dengan diberlakukannya MEA sebagai agenda perekonomian utama menuntut negara di kawasan Asia Tenggara untuk menyediakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan layak bersaing. Akibatnya, peran dan fungsi SEAMEO sebagai organisasi yang khusus menangani masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan semakin diperlukan.

Upaya yang dilakukan oleh SEAMEO untuk meningkatkan mutu pendidikan di Asia Tenggara agar mampu menghasilkan manusia yang lebih berkualitas ialah dengan menerapkan *seven priority agenda*. Agenda yang pertama ialah perawatan pendidikan anak usia dini, berkaitan dengan hal ini upaya yang dilakukan oleh SEAMEO ialah dengan menerapkan beberapa program diantaranya ialah, mengupayakan kesehatan anak dengan memenuhi kebutuhan makanan dan nutrisinya (SEAMEO RECFON), dan pemberian akses pendidikan layak bagi anak usia dini seperti Taman Kanak-kanak, tempat bermain (*play group*), tempat penitipan anak, serta sekolah atau kelompok belajar lainnya yang sesuai untuk pendidikan dasar anak usia dini (SEAMEO CELL). Agenda kedua ialah mengatasi hambatan dalam pendidikan, berkaitan dengan hal ini upaya yang dilakukan oleh SEAMEO melalui dua hal, yakni pertama ialah dengan menerapkan konsep *education for all* bagi semua anak yang ada di kawasan Asia Tenggara, dan yang kedua ialah dengan melakukan pertemuan dengan kementerian-kementerian pendidikan yang ada di masing-masing anggota SEAMEO, beserta 21 SEAMEO *center* untuk mengupayakan sebuah riset bersama. Agenda ketiga ialah memastikan ketahanan dalam keadaan darurat, berkaitan dengan hal ini upaya yang dilakukan oleh SEAMEO ialah dengan menerapkan program SEAMEO *Schools' Network*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas guru, siswa dan tenaga kependidikan melalui berbagai diskusi. Agenda keempat ialah mempromosikan teknis dan pelatihan pendidikan, berkaitan dengan permasalahan tersebut upaya yang dilakukan oleh SEAMEO adalah dengan mengadakan *Workshop* atau sebuah pertemuan pada tanggal 8 Maret 2016 untuk membangun aliansi strategis dan memobilisasi keahlian dan pengalaman dari para pemangku kepentingan di dalam dan luar negara-negara ASEAN. Agenda kelima ialah revitalisasi tenaga pengajar

(guru), berkaitan dengan hal ini SEAMEO telah melakukan beberapa upaya diantaranya pertama, *SEAMEO Regional Open Learning Centre* (SEAMEO SEAMOLEC) melatih lebih dari 24.923 guru, dosen, instruktur, tenaga kependidikan, kedua *SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel (QITEP) in Science* (*SEAMEO QITEP in Science*) memberikan dana penelitian bagi 12 guru sains di Indonesia, dan ketiga ialah *SEAMEO Regional Centre for Tropical Biology* (SEAMEO BIOTROP) memberikan pelatihan untuk tenaga pengajar dan guru. Agenda keenam adalah mempromosikan penyelarasan dalam pendidikan tinggi dan bidang penelitian, berkaitan dengan masalah ini SEAMEO RIHED menunjukkan perannya sebagai SEAMEO *center* yang khusus untuk menangani masalah pendidikan tinggi di kawasan Asia Tenggara. Upaya yang dilakukan oleh SEAMEO RIHED, ialah pertama melalui dialog kebijakan mengenai pendidikan tinggi yang ada di Asia Tenggara, kedua melakukan program *study visit*, dimana program ini diikuti oleh negara anggota SEAMEO, dan ketiga ialah melalui program mobilisasi siswa internasional (AIMS). Agenda ketujuh ialah mengadopsi kurikulum abad ke-21, berkaitan dengan masalah ini SEAMEO telah membentuk sebuah kerjasama yaitu *SEAMEO College*, melalui kerjasama ini nantinya para anggota SEAMEO dapat bertukar pengalaman dan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di masing-masing negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

APEC Secretariat. 1997. *“The Impact of Trade Liberalization”*. Singapura: APEC Secretariat.

- Chia, Siow Yue. 2013. *“The ASEAN Economic Community: Progress, Challenges, and Prospects”*. ADBI Working Paper Series. No. 440. Jepang: Asian Development Bank Institute
- Education For All (EFA). 2015. *Malaysia Education for All 2015 National Review*. Incheon: Education For All (EFA)
- EP-Nuffic. 2016. *The Singaporean Education System Described and Compared with the Dutch System*. Singapore: EP-Nuffic
- EP-Nuffic. 2016. *The Thai education system described and compared with the Dutch system*. Thailand: EP-Nuffic
- Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu). 2011. *“Ayo Kita Kenali ASEAN”*. Jakarta Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 2016. *Indonesia Educational Statistics in Brief 2015/2016*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
- Muhammad Idrus. 2009. *“Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua”*. Yogyakarta: Erlangga
- Ministry of Education Singapore. 2008. *A part of Singapore’s success story*. Siongapore: Ministry of Education Singapore
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2016. *Reviews of National Policies for Education Education in Thailand*. Thailand: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
- Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. 2011. *“Ayo Kita Kenali ASEAN”*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
- Siswaningsih, Dwi. 2015. *“Peluang dan Tantangan Indonesia Pasar Bebas ASEAN”*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
- The ASEAN Secretariat. 2015. *“ASEAN Economic Community”*. Jakarta: *The ASEAN Secretariat Public Outreach and Civil Society Division*
- The ASEAN Secretariat. 2015. *“ASEAN Economic Community”*. Jakarta: *The ASEAN Secretariat Public Outreach and Civil Society Division*
- Unicef Indonesia. 2012. *“Pendidikan & Perkembangan Anak Usia Dini”*. Jakarta: Unicef Indonesia

UNDP. 2016. *Human Development for Everyone Briefing note for countries on the 2016 Human Development Report Brunei Darussalam*. Brunei Darussalam: UNDP

UNESCO. 2011. *World Data on Education Cambodia*. Cambodia: UNESCO

UNESCO. 2015. “*Education for All 2000-2015: achievements and challenges*”. France: *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*

UNESCO Bangkok. 2014. *Education Systems in ASEAN+6 Countries: A Comparative Analysis of Selected Educational Issues*. Bangkok: UNESCO office

UNICEF Indonesia. 2012. “*Pendidikan dan Perkembangan Anak Usia Dini*”. Jakarta: UNICEF Indonesia

Unicef Indonesia. 2015. “*Laporan Tahunan Unicef Indonesia Tahun 2015*”. Jakarta: Unicef Indonesia

World Economic Forum (WEF). 2016. *Human Capital Outlook Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*. Kuala Lumpur: *World Economic Forum*

JURNAL

Fawn, Rick. 2009. “‘Regions’ and their study: wherefrom, what for and whereto?”. *Review of International Studies*. Vol. 35 No. 5-34. British: Cambridge Journal

Rositawati, Tita. 2014. “*Konsep Pendidikan John Dewey*”. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 02 No. 2. Gorontalo: IAIN Sultan Amai

Saputri, Ananda Ruriska. 2014. Peran PERAN ASEAN Intergovernmental Commission Of Human Rights (AICHR) dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia di Kawasan Negara Anggota ASEAN. *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 1 No. 2. Samarinda: Universitas Mulawarman

SEAMEO CELL. Vol. 1 Januari-Maret 2016. *SEAMEO CELL NEWSLETTER*. Vietnam: SEAMEO CELL

INTERNET

ASEAN. 2017. “*About ASEAN*”. Diakses dari <http://asean.org/asean/about-asean/> [19 Januari 2017]

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2017. “*Kependudukan*”. Diakses dari <https://www.bps.go.id> [28 April 2017]

- Central Intelligence Agency (CIA). 2017. *The World Factbook Malaysia*. Diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html> [28 April 2017]
- Departement of Statistics Malaysia (DOSM). 2017. *National Accounts*. Diakses dari https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/ctwoByCat&parent_id=99&menu_id=TE5CRUZCblh4ZTZMODZlBmk2aWRRQT09 [28 April 2017]
- Departement of Statistic Malaysia. 2017. *Population & Demography*. Diakses dari https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/ctwoByCat&parent_id=99&menu_id=TE5CRUZCblh4ZTZMODZlBmk2aWRRQT09[pada 1 Mei 2017]
- Departement of Statistic Singapore. 2017. *Population and Population Structure*. Diakses dari <http://www.singstat.gov.sg/statistics/browse-by-theme/population-and-population-structure> [pada 2 Mei 2017]
- Department of Statistic Thailand. 2017. *Statistics*. Diakses dari <http://www.rd.go.th/publish/5999.0.html>[pada 2 Mei]
- Education For All (EFA). 2015. *Philippine Education For All 2015: Implementation and Challenges*. Diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj_vrfqrMbUAhUMOY8KHyr2AAAYQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unescobkk.org%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fefa%2FEFA_MDA%2FNational_EFA_MDA_Reports%2FPhilippines_EFA_MDA_FINAL.pdf&usg=AFQjCNH3aTHYQbemubgQktqvNLwiJUfDQ&sig2=w5JdpmYuN0echaXP49PsAw[pada 3 Mei 2017]
- EP-Nuffic. 2015. *The Malaysian education system described and compared with the Dutch system*. Diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwj72J-vm8bUAhXGr48KHT4XBGgQFghSMAY&url=https%3A%2F%2Fwww.nuffic.nl%2Fen%2Fpublications%2Ffind-a-publication%2Feducation-system-malaysia.pdf&usg=AFQjCNGUhGjWax5_Rflgsrgrbxo8jw0YBgA&sig2=60XRYm1Bej2fsb6hbbY5GA [1 Mei 2017]
- Global Partnerships*. 2017. Cambodia. Diakses dari <http://www.globalpartnership.org/country/cambodia>[pada 3 Mei 2017]

- Global Partnerships*. 2017. Lao Diakses dari <http://www.globalpartnership.org/country/lao-pdr>[pada 3 Mei 2017]
- Global Partnerships*. 2017. Vietnam. Diakses dari <http://www.globalpartnership.org/country/vietnam>[pada 3 Mei 2017]
- Härkki, Jyrki. 2017. *Myanmar's education sector*. Diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFgfzhsMbUAhVJLI8KHfvBA7wQFghPMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.exportfinland.fi%2Fdocuments%2F10304%2Ffc36da0b-a45d-4819-8472-b227dfba122e&usq=AFQjCNHmK6tWoV1003bJHh5_o3AkbsaY-g&sig2=FzFoO_GGu-zDTfy1JViZvg [pada 4 Mei 2017]
- KBBIOnline. 2017. “Pengertian Kata Didik”. Diakses dari <http://kbbi.web.id/didik>[28 April 2017]
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). 2016. “Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara Siapkan Program Aksi Pendidikan”. Diakses dari <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/04/organisasi-menteri-pendidikan-asia-tenggara-siapkan-program-aksi-pendidikan> [19 Januari 2017]
- Knoema. 2017. *World GDP Per Capita Ranking 2015*. Diakses dari <https://knoema.com/sijweyg/world-gdp-per-capita-ranking-2016-data-and-charts-forecast>[5 juni 2017]
- Index Mundi. 2017. *Malaysia Ppopulation*. Diakses dari <http://www.indexmundi.com/malaysia/population.html> [28 April 2017]
- Ravenhill, John. 2004. “*Regionalism*”. Diakses dari <http://hamdoucheriad.yolasite.com>[23 Januari 2017]
- SEAMEO RECFON. 2017. *About SEAMEO RECFON*. Diakses dari <https://www.seameo-recfon.org/>[pada 6 Juni 2017]
- SEAMEO. 2016. *SEAMEO College Project Management Committee Meeting and SEAMEO Workshop on the Development of the 2035 Education Agenda Roadmap*. Diakses dari <http://www.seameocollege.org/seameocollege/>[pada 7 Juni 2017]
- SEAMEO. 2017. *SEAMEO School's Network*. Diakses dari http://www.seameo.org/SEAMEOWeb2/index.php?option=com_content&view=article&id=554&Itemid=554 [pada 7 Juni 2017]

- Southeast Asian Minister of Education Organization (SEAMEO)*. 2017. "What is SEAMEO?". Diakses dari <http://www.seameo.org>[pada 5 Juni 2017]
- Theguardian. 2010. "World education rankings: which country does best at reading, maths and science?". Diakses dari <https://www.theguardian.com/news/datablog/2010/dec/07/world-education-rankings-maths-science-reading#data> [19 Januari 2017]
- UNChronicle. 2014. "From the Congress of Vienna to Present-Day International Organizations". Diakses dari <https://unchronicle.un.org/article/congress-vienna-present-day-international-organizations> [23 Januari 2017]
- World Bank Official Website*. 2017. Brunei Darussalam. Diakses dari <http://data.worldbank.org/country/brunei-darussalam>[Pada 3 Mei 2017]
- World Bank Official Website*. 2017. Cambodia. Diakses dari <http://www.worldbank.org/en/country/cambodia>[pada 3 Mei 2017]
- World Bank Official Website*. 2017. Kamboja. Diakses dari <http://www.worldbank.org/en/country/cambodia>[pada 3 Mei 2017]
- World Bank Official Website*. 2017. Philipines. Diakses dari <http://data.worldbank.org/country/philippines>[pada 3 Mei 2017]
- World Bank Official Acount*. 2017. Singapore. Diakses dari <http://www.worldbank.org/en/country/singapore>[28 April 2017]
- World Bank Official Website*. 2017. Vietnam. Diakses dari <http://www.worldbank.org/en/country/vietnam>[pada 3 Mei 2017]

LAMPIRAN

GROSS DOMESTIC PRODUCT 2015

Country

(millions of

| <i>Ranking</i> | <i>Economy</i> | <i>US dollars)</i> | |
|----------------|----------------------|--------------------|---|
| 1 | United States | 18,036,648 | |
| 2 | China | 11,064,665 | |
| 3 | Japan | 4,383,076 | |
| 4 | Germany | 3,363,447 | |
| 5 | United Kingdom | 2,861,091 | |
| 6 | France | 2,418,836 | |
| 7 | India | 2,088,841 | |
| 8 | Italy | 1,821,497 | |
| 9 | Brazil | 1,803,653 | |
| 10 | Canada | 1,552,808 | |
| 11 | Korea, Rep. | 1,377,873 | |
| 12 | Russian Federation | 1,365,865 | A |
| 13 | Australia | 1,339,141 | |
| 14 | Spain | 1,192,901 | |
| 15 | Mexico | 1,143,793 | |
| 16 | Indonesia | 861,934 | |
| 17 | Netherlands | 750,284 | |
| 18 | Turkey | 717,880 | |
| 19 | Switzerland | 670,790 | |
| 20 | Saudi Arabia | 646,002 | |
| 21 | Argentina | 584,711 | B |
| 22 | Sweden | 495,694 | |
| 23 | Nigeria | 486,793 | |
| 24 | Poland | 477,066 | |
| 25 | Belgium | 455,086 | |
| 26 | Iran, Islamic Rep. | 425,326 | |
| 27 | Thailand | 395,168 | |
| 28 | Norway | 386,578 | |
| 29 | Austria | 376,950 | |
| 30 | United Arab Emirates | 370,296 | |
| 31 | Egypt, Arab Rep. | 330,779 | |

| | | | |
|----------------|----------------------|--------------------|---|
| 32 | South Africa | 314,572 | |
| 33 | Hong Kong SAR, China | 309,235 | |
| 34 | Denmark | 301,308 | |
| 35 | Israel | 299,416 | |
| 36 | Malaysia | 296,283 | |
| 37 | Singapore | 292,739 | |
| 38 | Philippines | 292,451 | |
| 39 | Colombia | 292,080 | |
| 40 | Ireland | 283,703 | |
| 41 | Pakistan | 271,050 | |
| 42 | Chile | 240,796 | |
| 43 | Finland | 232,351 | |
| 44 | Portugal | 199,113 | |
| 45 | Bangladesh | 195,079 | |
| 46 | Greece | 194,851 | |
| 47 | Vietnam | 193,599 | |
| 48 | Peru | 189,111 | |
| 49 | Czech Republic | 185,156 | |
| 50 | Kazakhstan | 184,388 | |
| 51 | Iraq | 180,069 | |
| 52 | Romania | 177,954 | |
| 53 | New Zealand | 173,754 | |
| 54 | Algeria | 164,779 | |
| 55 | Qatar | 164,641 | |
| 56 | Hungary | 121,715 | |
| 57 | Kuwait | 114,041 | |
| 58 | Puerto Rico | 103,135 | |
| 59 | Angola | 102,627 | |
| 60 | Morocco | 100,593 | c |
| 61 | Ecuador | 100,177 | |
| <i>Ranking</i> | <i>Economy</i> | <i>US dollars)</i> | |
| 62 | Sudan | 97,156 | |

| | | | |
|----|--------------------|--------|---|
| 63 | Ukraine | 90,615 | A |
| 64 | Slovak Republic | 87,264 | |
| 65 | Cuba | 87,133 | |
| 66 | Sri Lanka | 82,316 | |
| 67 | Oman | 69,831 | |
| 68 | Dominican Republic | 68,103 | |
| 69 | Uzbekistan | 66,733 | |
| 70 | Guatemala | 63,794 | |
| 71 | Kenya | 63,398 | |
| 72 | Myanmar | 62,601 | |
| 73 | Ethiopia | 61,540 | |
| 74 | Luxembourg | 56,800 | |
| 75 | Belarus | 54,609 | |
| 76 | Costa Rica | 54,137 | |
| 77 | Uruguay | 53,443 | |
| 78 | Azerbaijan | 53,047 | |
| 79 | Panama | 52,132 | |
| 80 | Bulgaria | 50,199 | |
| 81 | Croatia | 48,732 | |
| 82 | Lebanon | 47,085 | |
| 83 | Macao SAR, China | 46,178 | |
| 84 | Tanzania | 45,628 | D |
| 85 | Tunisia | 43,015 | |
| 86 | Slovenia | 42,775 | |
| 87 | Lithuania | 41,400 | |
| 88 | Yemen, Rep. | 37,734 | |
| 89 | Ghana | 37,543 | |
| 90 | Jordan | 37,517 | |
| 91 | Serbia | 37,160 | |
| 92 | Turkmenistan | 35,855 | |
| 93 | Congo, Dem. Rep. | 35,238 | |
| 94 | Bolivia | 32,998 | |

| | | | |
|-----|------------------------|--------|---|
| 95 | Côte d'Ivoire | 31,759 | |
| 96 | Bahrain | 31,126 | |
| 97 | Cameroon | 28,416 | |
| 98 | Uganda | 27,529 | |
| 99 | Paraguay | 27,094 | |
| 100 | Latvia | 27,003 | |
| 101 | El Salvador | 25,850 | |
| 102 | Trinidad and Tobago | 23,559 | |
| 103 | Estonia | 22,459 | |
| 104 | Nepal | 21,195 | |
| 105 | Zambia | 21,154 | |
| 106 | Honduras | 20,421 | |
| 107 | Cyprus | 19,560 | E |
| 108 | Afghanistan | 19,331 | |
| 109 | Cambodia | 18,050 | |
| 110 | Papua New Guinea | 16,929 | |
| 111 | Iceland | 16,780 | |
| 112 | Bosnia and Herzegovina | 16,192 | |
| 113 | Mozambique | 14,807 | |
| 114 | Zimbabwe | 14,419 | |
| 115 | Botswana | 14,390 | |
| 116 | Jamaica | 14,262 | |
| 117 | Gabon | 14,262 | |
| 118 | Georgia | 13,965 | F |
| 119 | Senegal | 13,610 | |
| 120 | Brunei Darussalam | 12,930 | |
| 121 | Mali | 12,747 | |
| 122 | Nicaragua | 12,693 | |

| <i>Ranking</i> | <i>Economy</i> | <i>US dollars)</i> | |
|----------------|--------------------------|--------------------|--|
| 184 | Northern Mariana Islands | 922 | |

| | | | |
|-----|--------------------------------|-----|--|
| 185 | St. Kitts and Nevis | 876 | |
| 186 | Samoa | 761 | |
| 187 | Vanuatu | 742 | |
| 188 | St. Vincent and the Grenadines | 738 | |
| 189 | American Samoa | 641 | |
| 190 | Comoros | 566 | |
| 191 | Dominica | 517 | |
| 192 | Tonga | 435 | |
| 193 | São Tomé and Príncipe | 318 | |
| 194 | Micronesia, Fed. Sts. | 315 | |
| 195 | Palau | 287 | |
| 196 | Marshall Islands | 179 | |
| 197 | Kiribati | 160 | |
| 198 | Nauru | 100 | |
| 199 | Tuvalu | 33 | |
| | Aruba | .. | |
| | British Virgin Islands | .. | |
| | Cayman Islands | .. | |
| | Channel Islands | .. | |
| | Curaçao | .. | |
| | Eritrea | .. | |
| | French Polynesia | .. | |
| | Gibraltar | .. | |
| | Korea, Dem. People's Rep. | .. | |
| | Libya | .. | |
| | Monaco | .. | |
| | New Caledonia | .. | |
| | San Marino | .. | |
| | Sint Maarten (Dutch part) | .. | |
| | St. Martin (French part) | .. | |
| | Syrian Arab Republic | .. | |
| | Turks and Caicos Islands | .. | |

| | | | |
|--|----------------------------|-------------------|--|
| | Venezuela, RB | .. | |
| | | | |
| | World | 74,188,701 | |
| | East Asia & Pacific | 21,680,001 | |
| | Europe & Central Asia | 20,080,050 | |
| | Latin America & Caribbean | 5,326,923 | |
| | Middle East & North Africa | 3,141,081 | |
| | North America | 19,595,347 | |
| | South Asia | 2,689,862 | |
| | Sub-Saharan Africa | 1,590,036 | |
| | Low income | 394,274 | |
| | Lower middle income | 5,861,047 | |
| | Upper middle income | 20,523,702 | |
| | High income | 47,417,015 | |

Sumber: *World Bank*. 2017. *World Development Indicators Database*. Diakses dari <http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table> pada 18 Juni 2017